



Diklat Teknis Tematik Kede

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 – 2023

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS



Poktan karyo mulyo 3 desa banjarparakan kec.rawalo kab. banyumas
-7°32'22", 109°9'50", 48, 29/06/2018 10:54



Poktan Aditutama Asisara Jatilawanh
-7,54473, 109,12289, 34,0m, 66° 17 Okt 2018 12:46:52



Poktan Dewa Sari Banjarparakan 3 desa
-7,5013, 109,14251, 46,0m, 122° 17 Okt 2018 11:45:30:02



-6,6113, 111,11132, 118,0m 26 Okt 2018 09:00:00



Kec.Kemranjen Banyumas
-7°35'1", 109°18'52", 44,0m, 65°



Kec.Kemranjen
-7°35'2", 109°18'53", 44,0m, 65°



3 desa banjarparakan kec.rawalo kab. banyumas
-7°32'22", 109°9'50", 4,3m 29/06/2018 11:24:41



SE Pisang Ds Paningkabon, Gumelar
-7°25'3", 108°59'50", 171,0m, 46°

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Landasan Hukum	3
1. 3. Maksud Dan Tujuan	7
1. 4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	10
2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas	10
2. 2. Sumber Daya Dinas	27
2. 3. Kinerja Pelayanan Dinas	29
2. 4. Tantangan dan Peluang Dinas	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40
3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	48
3. 3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian	58
3. 4. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi	61
3. 5. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi	64
3. 6. Telaahan Tata Ruang Wilayah	66
3. 7. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	68
3. 8. Penentuan Isu-Isu Strategis	68

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	69
4. 1. Tujuan Jangan Menengah	69
4. 2. Sasaran Jangan Menengah	69
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	77
5. 1. Strategi	77
5. 2. Arah Kebijakan	78
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	83
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	100
BAB VIII PENUTUP	103

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Produktivitas padi dan bahan pangan tahun 2013-2018	32
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35
Tabel 3.1. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2018 - 2023	53
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60
Tabel 3.3. Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	63
Tabel 3.4. Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	52
Tabel 3.5. Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	65
Tabel 4.1. Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	70
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023	72
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	80
Tabel 6.1. Pendanaan Indikatif Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023	86
Tabel 6.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023	102

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Bagan susunan organisasi	12
Gambar 2.2. Sumber Daya Manusia Pertanian	28
Gambar 2.3. Target dan Realisasi Produktivitas Padi Tahun 2018-2023	29
Gambar 2.4. Target dan Realisasi Produktivitas Padi Sawah Tahun 2018-2023	30
Gambar 2.5. Target dan Realisasi Produktivitas Padi Gogo Tahun 2018-2023	30
Gambar 2.6. Target dan Realisasi Produktivitas Jagung Tahun 2018-2023	31
Gambar 2.7. Target dan Realisasi Produktivitas Kedelai Tahun 2018-2023	31
Gambar 2.8. Target dan Realisasi Produktivitas Kedelai Tahun 2018-2023	32

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. SK Tim Penyusun Rencana Straegis	104

BAB I.

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan, pun mengemban amanah pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah mempunyai tugas menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 mengamanatkan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bagi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah, berisikan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD

dan bersifat indikatif, serta memuat penetapan target pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dengan menyelaraskannya pada pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian.

Rencana Strategis disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023

Rencana Strategis (Renstra) disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan pertanian. Oleh karena itu, dokumen Renstra merupakan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian perkebunan dan Ketahanan Pangan periode 2019-2023 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Disamping itu Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1. 2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 3599/Kpts/DP.310/10/ 2009 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura.
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 124/Permentan/ OT:140/12/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan

Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 19/Permentan/ HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1).

1. 3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Startegis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas :

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
- b. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 5 (lima) tahun, Tahun 2018-2023.
- c. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas selama 5 tahun kedepan, Tahun 2018-2023.

2. Tujuan

- a. Mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Banyumas Tahun 2018– 2023;

1. 4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan OPD

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB II.

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

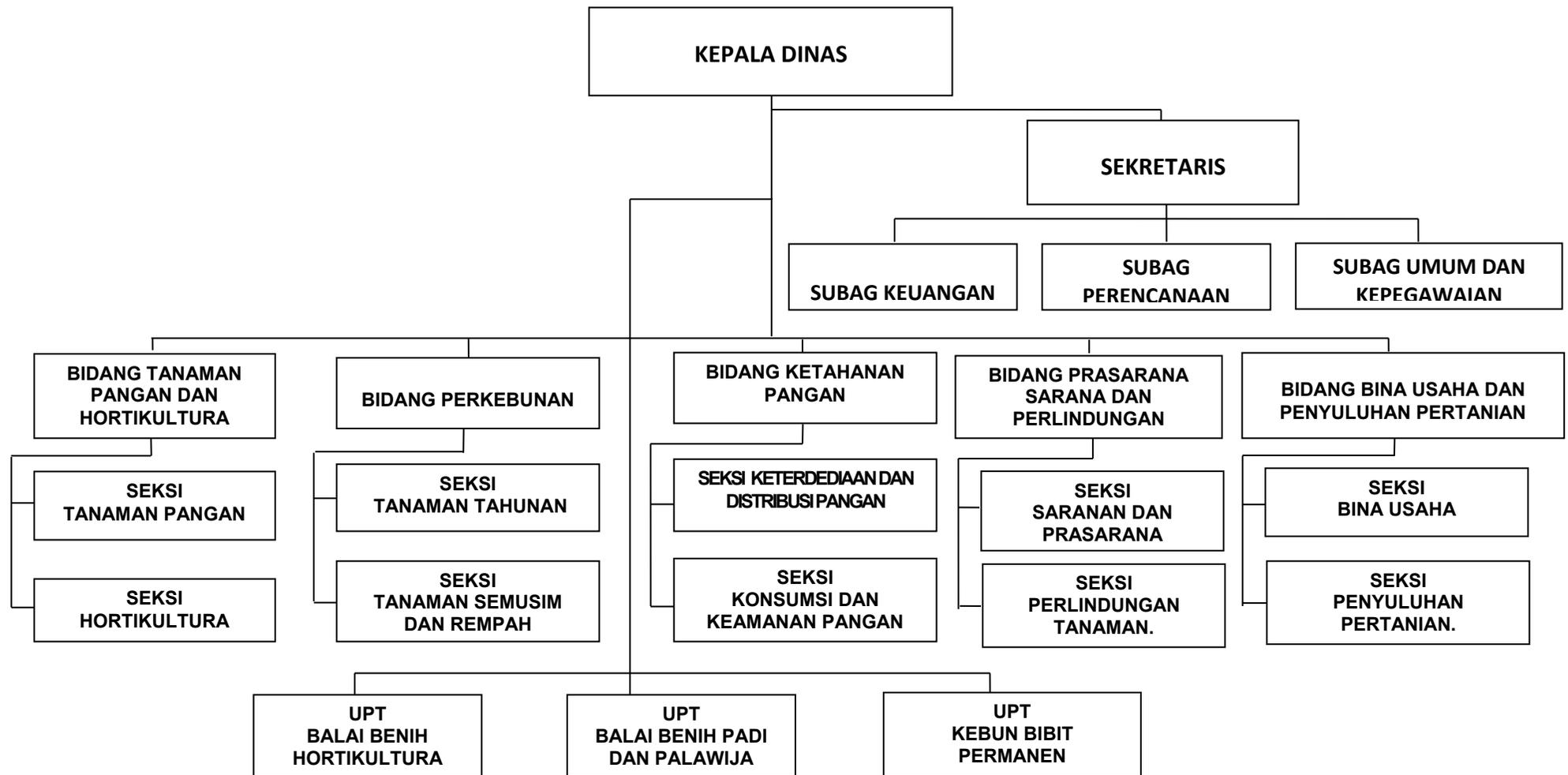
2. 1. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1.2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Mendasari Peraturan Bupati Banyumas nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, susunan organisasi dan bagan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris , terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a) Seksi Tanaman Pangan
 - b) Seksi Hortikultura
4. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - a) Seksi Tanaman Tahunan
 - b) Seksi Tanaman Semusim dan Rempah
5. Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - a) Seksi Sarana dan Prasaana
 - b) Seksi Perlindungan Tanaman
6. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - b) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
7. Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Usaha

- b) Seksi Penyuluhan Pertanian
8. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
- a) Balai Benih Padi dan Palawija
 - b) Balai Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman
 - c) Kebun Bibit Permanen
9. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1. Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

2.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana sarana dan perlindungan tanaman, bidang ketahanan pangan dan bidang usaha dan penyuluhan pertanian yang menjadi kewenang daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana sarana dan perlindungan tanaman, bidang ketahanan pangan dan bidang usaha dan penyuluhan pertanian;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana sarana dan perlindungan tanaman, bidang

ketahanan pangan dan bidang usaha dan penyuluhan pertanian;

3. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana sarana dan perlindungan tanaman, bidang ketahanan pangan dan bidang usaha dan penyuluhan pertanian;
4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana sarana dan perlindungan tanaman, bidang ketahanan pangan dan bidang usaha dan penyuluhan pertanian;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peloran kesekretariatan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana sarana dan perlindungan tanaman, bidang ketahanan pangan dan bidang usaha dan penyuluhan pertanian;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana sarana dan perlindungan tanaman, bidang ketahanan pangan dan bidang usaha dan penyuluhan pertanian;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksanan Teknis;
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupti sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah, sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan keuangan, ketatusahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi :

1. Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan pogram kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. Pengkoodinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peratuaran perundang-undangan serta pelaksanaan avokasi hukum di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
7. Pelaksanaan kebijakan kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

8. Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dan kearsipan;
9. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang /jasa di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekretariat di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
11. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat dibantu oleh 3 sub bagian dengan tugas sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian

dan pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pemngkoordinasian, pebinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan krgiatan, kegiatan urusan pemerintah daerah bidang pertanian subbidang tanaman pangan dan hortikultura meliputi pembenihan pembinaan kelompok tani, pengembangan teknologi, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, statistik tanamanpangan dan hortikultura, pengarahan, pemberian petunjuk dan bimbingan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

1. Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan dan menyiapkan rencana kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan rencana kegiatan masing-masing seksi;
2. Pelaksanaan kebijakan kegiatan, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing
3. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja bdfang tanaman pangan dan hortikultura, melaksanakan pemantauan dan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
4. Pembinaan dan fasilitasi dan pemberian dukungan admiistrasi yang meliputi kegiatan tanaman pangan dan hortikultura,memberikan petunjuk dan bimbingan teknis;
5. Pengkoordinasian, pembinaan dan menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan teknologi produksi tanaman pangan dan hortikultura;

6. Penkoordinasian dan melaksanakan bimbingan , pemantauan penyediaan dan penggunaan benih tanaman pangan hortikultura;
7. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing seksi;
8. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
9. Menilai hasil kerja bawahan dan melaksanakan sistem pengendalian intern;
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang tanaman pangan dan hortikultura dibantu oleh 2 seksi dengan tugas sebagai berikut:

1. Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi , monitoring, evaluasi dan plaporan tentang seksi tanaman pangan meliputi pengelolaan perbenihan, pembinaan kelompok tani, pengembangan produksi, teknologi padi palawija, pembinaan panen melalui kegiatan fasilitasi, bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi dan superisi dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas produksi dan poduktivitas.
2. Seksi Hotikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi , monitoring, evaluasi dan plaporan tentang seksi hortikultura meliputi pengelolaan perbenihan dan perbibitan, pembinaan kelompok tani, pengembangan produksi teknologi tanaman hortikultura, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, pengkajian dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas produksi dan poduktivitas.

3. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pemngkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, kegiatan urusan pemerintah daerah bidang pertanian subbidang perkebunan meliputi pengelolaan pembenihan, pembinaan kelompok tani, pengembangan produksi, teknologi tanaman perkebunan, pembinaan panen dan pasca panen, pengarahan, pemberian petunjuk dan konsultasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dan produktivitas

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

1. Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan teknis pembinaan pengembangan produksi, produktivitas, teknologi, perbenihan sistem dan penetapan sentra produksi pekebunan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja potensi produksi tanaman perkebunan dan rencana pemanfaatannya;
3. Pengkoordinasian kegiatan sentra-sentra produksi bidang perkebunan;
4. Pengkoordinasian pembinaan dan penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi, sistem dan penetapan sentra produksi perkebunan;
5. Pengkoordinasian menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengembangan produksi produktivitas, teknologi, perbenihan, sistem dan penetapan sentra produksi perkebunan;
6. Pengkoordinasian menyiapkan pelaksanaan, pengawasan kegiatan pengembangan produksi produktivitas, teknologi, perbenihan, sistem dan penetapan sentra produksi perkebunan;
7. Pengkoordinasian menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis perbenihan perkebunan;

8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan, dan
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perkebunan dibantu oleh 2 seksi dengan tugas sebagai berikut:

1. Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi , monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan teknis dan penyelenggaraan bidang pertanian sub bidang perkebunan meliputi pengelolaan perbenihan, pembinaan kelompok tani, pengembangan produksi, teknologi tanaman tahunan, pembinaan panen dan pasca panen melalui fasilitasi, bimbingan teknis, sosialisasi, survey, penelitaian dan kaji terap dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas produksi dan poduktivitas.
2. Seksi Tanaman Semusin dan Rempah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi , monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan teknis dan penyelenggaraan bidang pertanian sub bidang perkebunan meliputi pengelolaan perbenihan, pembinaan kelompok tani, pengembangan teknologi, pembinaan panen dan pasca panen tanaman semusim dan rempah, melalui fasilitasi, bimbingan teknis, sosialisasi, survey, penelitaian dan kaji terap dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas produksi dan poduktivitas.

4. Bidang Prasarana, Sarana dan Perlindungan Tanaman

Bidang Prasarana Saranadan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pemngkoordinasian, pebinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

bidang pertanian dan perkebunan meliputi pengelolaan air dan sumber-sumber air untuk pertanian dan perkebunan pembenihan, dan pengelolaan alat mesin pertanian dan perkebunan pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil, perlindungan tanaman dan sarana pengendali OPT, dampak perubahan iklim, bencana alam, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida dan rekomendasi izin alih fungsi lahan pertanian

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

1. Perumusan konsep kebijakan teknis meliputi kegiatan pengelolaan lahan, air dan sumber-sumber air untuk pertanian dan perkebunan, pembinaan dan pengelolaan alat mesin pertanian dan perkebunan pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil, perlindungan tanaman dan sarana pengendali OPT, dampak perubahan iklim, bencana alam, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida dan rekomendasi izin alih fungsi lahan pertanian perkebunan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan program kegiatan pengelolaan lahan, air dan sumber-sumber air untuk pertanian dan perkebunan, pembinaan dan pengelolaan alat mesin pertanian dan perkebunan pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil, perlindungan tanaman dan sarana pengendali OPT, dampak perubahan iklim, bencana alam, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida dan rekomendasi izin alih fungsi lahan pertanian perkebunan;
3. Pengkoordinasian kegiatan dan penyiapan pelaksanaan pembinaan bagi petugas kegiatan pengelolaan lahan, air dan sumber-sumber air untuk pertanian dan perkebunan, pembinaan dan pengelolaan alat mesin pertanian dan perkebunan pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil, perlindungan tanaman dan sarana pengendali OPT,

- dampak perubahan iklim, bencana alam, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida dan rekomendasi izin alih fungsi lahan pertanian perkebunan; dan pengolahan lahan;
4. Pengkoordinasian, pembinaan, penyiapan, pengawasan kegiatan pengelolaan lahan, air dan sumber-sumber air untuk pertanian dan perkebunan, pembinaan dan pengelolaan alat mesin pertanian dan perkebunan pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil, perlindungan tanaman dan sarana pengendali OPT, dampak perubahan iklim, bencana alam, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida dan rekomendasi izin alih fungsi lahan pertanian perkebunan;
 5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang prasarana, sarana dan perlindungan tanaman;
 6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 7. Pelaksanaan kebijakan kegiatan perlindungan tanaman dan prasarana dan sarana;
 8. Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan perlindungan tanaman dan prasarana dan sarana;
 9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan lahan, air dan sumber-sumber air untuk pertanian dan perkebunan, pembinaan dan pengelolaan alat mesin pertanian dan perkebunan pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil, perlindungan tanaman dan sarana pengendali OPT, dampak perubahan iklim, bencana alam, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida dan rekomendasi izin alih fungsi lahan pertanian perkebunan;
 10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Perlindungan Tanaman, dibantu oleh 2 seksi dengan tugas sebagai berikut:

1. Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan teknis dan penyelenggaraan bidang pertanian sub bidang perkebunan meliputi pelaksanaan kegiatan bimbingan, pengamatan, identifikasi peramalan, pemetaan, pengendalian, analisis dan penyebarluasan kondisi OPT dan dampak perubahan iklim, bencana alam, penataan, pengawasan, pembinaan, pengendalian OPT, penyimpanan dan tata cara penggunaan pestisida OPT serta alat-alat OPT, pengembangan agensia hayati dan teknologi lainnya, dalam rangka peningkatan kualitas, kuantitas produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan, pembinaan dan pengembangan pupuk organik, pemetaan, pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan, pembinaan dan rekomendasi izin alih fungsi lahan pertanian.
2. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang bidang pertanian perkebunan meliputi pelaksanaan kegiatan bimbingan, pengamatan, identifikasi peramalan, pemetaan, pengendalian, analisis kekeringan dan banjir dampak perubahan iklim, dan bencana alam, pembinaan, pengelolaan dan pengembangan lahan, air dan sumber-sumber air untuk pertanian dan perkebunan, pembinaan, pengelolaan dan pengembangan alat mesin pertanian dan perkebunan pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil panen

5. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan, konsumsi, keamanan dan penganeekaragaman konsumsi pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
2. Penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
5. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan;
7. Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengenalian dan evaluasi di bidang ketersediaan

- pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
8. Penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan;
 9. Penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 10. Penyiapan bahan perumusan kebijakan harga minuman pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 11. Penyiapan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
 12. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan, dan ;
 13. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Perlindungan Tanaman, dibantu oleh 2 seksi dengan tugas sebagai berikut:

1. Seksi ketersediaan dan distribusi pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan;
2. Seksi konsumsi dan keamanan pangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang konsumsi, keamanan dan penganekaragaman konsumsi pangan

6. Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Pertanian

Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengolahan, pemasaran hasil tanaman pangan, hortikulturadan perkebunan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

1. Penyiapan kebijakan di bidang pengolahan, pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
2. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Pemberian izin usaha / rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, hortikulturadan perkebunan;
4. Penyusunan program usaha pertanian;
5. Pemberian bimbingan teknis usaha pertanian;
6. Pemberian fasilitasi pelayanan investasi pertanian;
7. Pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan petani;
8. Pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian;
9. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan, pemasaran hasil tanaman pangan, hortikulturadan perkebunan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Pertanian, dibantu oleh 2 seksi dengan tugas sebagai berikut:

1. Seksi Bina Usaha, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan,

pembinaan, dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta;

2. Seksi Penyuluhan Pertanian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan dan metode serta informasi penyuluhan pertanian.

7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dilingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

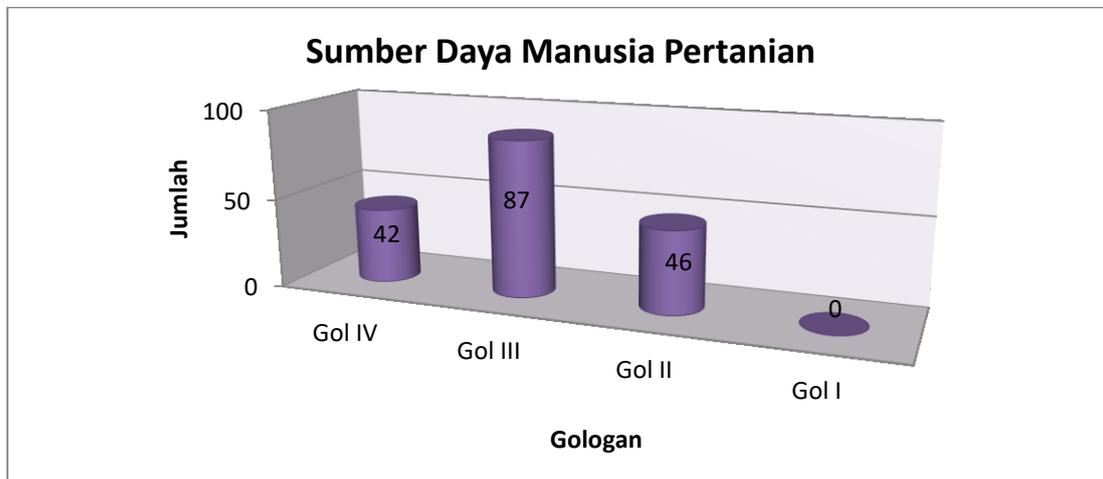
2. 2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas

Jumlah pegawai yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah 175 orang dengan perincian :

- | | | |
|------------------|----|-------|
| a) Golongan IV, | 42 | orang |
| b) Golongan III, | 87 | orang |
| c) Golongan II, | 46 | orang |
| d) Golongan I, | 0 | orang |

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 maka seluruh PNS yang ada di daerah statusnya diserahkan ke daerah, sehingga seluruh PNS di Dinperten dan KP berstatus PNS DO (Daerah Otonom).



Gambar 2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas

2.2.2. Sarana Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas

a) Barang bergerak

Berupa 7 kendaraan roda empat dan 155 unit kendaraan roda dua yang sampai dengan akhir tahun 2018 masih terawat dengan baik.

b) Barang Tidak bergerak

1) Tanah

Tanah yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 30 bidang tanah, dengan luas keseluruhan 1.765.628 m². Sampai dengan akhir tahun 2012, tanah tersebut sudah bersertifikat 26 bidang dan belum bersertifikat 4 bidang.

2) Gedung / bangunan

Gedung/bangunan yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan

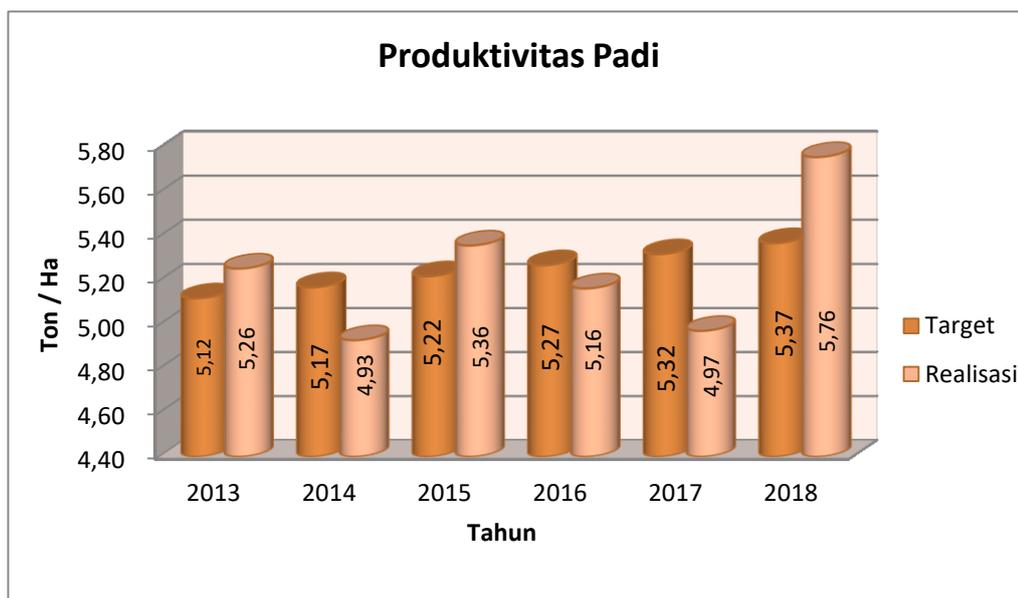
Pangan Kabupaten Banyumas adalah 27 unit gedung, dan seluruhnya dalam kondisi baik.

3) Barang inventaris lainnya

Terdapat beberapa jenis inventaris lain yang dikelola Dinperten dan KP Kabupaten Banyumas antara lain computer, printer, mebelair, hand sprayer, brender, kendaraan tiga, hand tracktor, traktor roda 4 dan barang-barang inventaris lainnya,

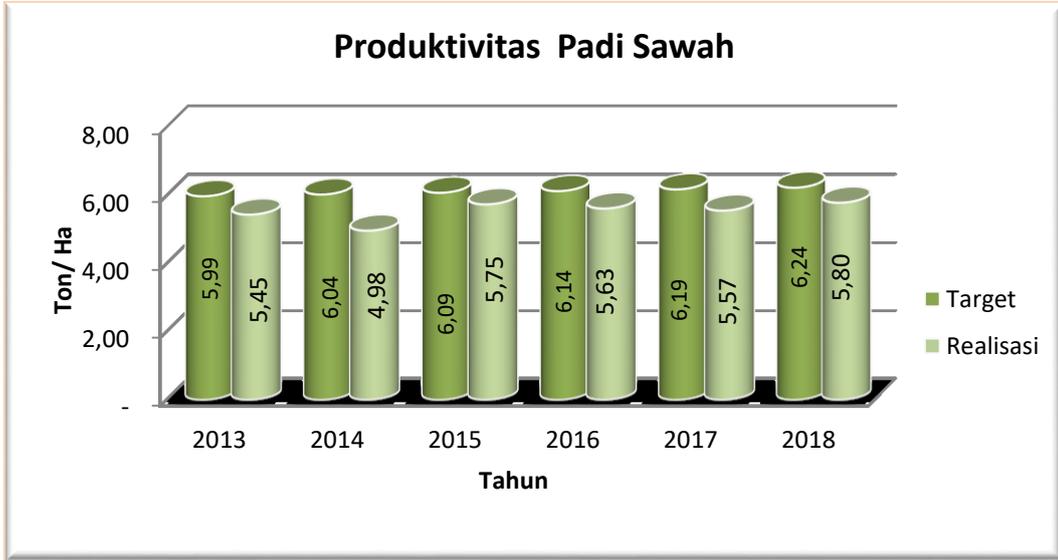
2. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Capaian produktivitas komoditas pertanian selama tahun 2013-2018 menunjukkan hasil yang fluktuatif, antara lain peningkatan produktivitas padi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berturut-turut adalah 5,26 ton/ha, 4,93 ton/ha, 5,36 ton/ha, 5,17 ton/ha, 4,97 ton/ha dan 5,76 ton/ha.



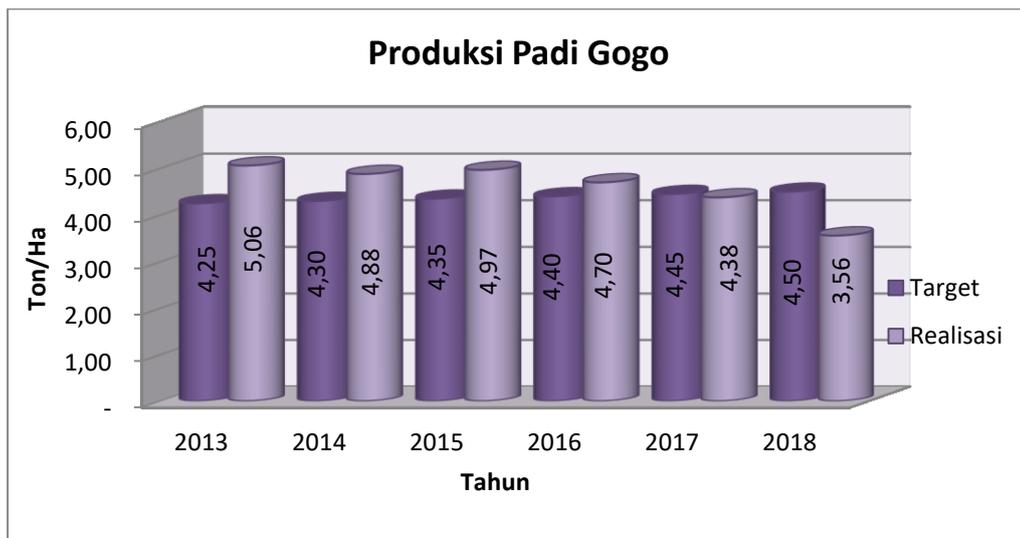
Gambar 2.3. Target dan realisasi produktivitas padi tahun 2013-2018

Capaian produktivitas padi sawah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berturut-turut adalah 5,45 ton/ha, 4,98 ton/ha, 5,75 ton/ha, 5,63 ton/ha, 5,57 ton/ha dan 6,24 ton/ha.



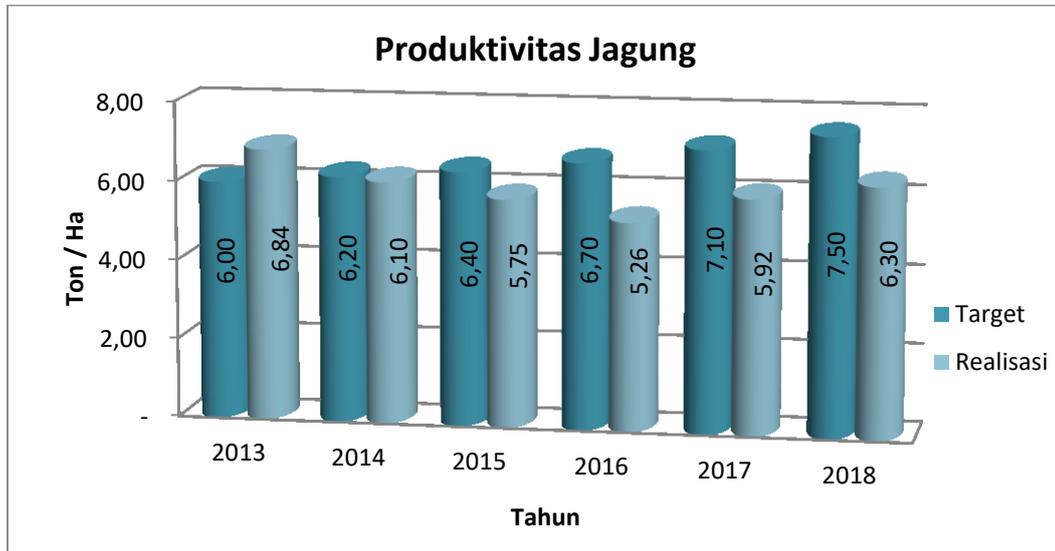
Gambar 2.4. Target dan realisasi produktivitas sawah padi tahun 2013-2018

Capaian produktivitas padi gogo dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berturut-turut adalah 5,06 ton/ha, 4,88 ton/ha, 4,97 ton/ha, 4,70 ton/ha, 4,38 ton/ha dan 3,56 ton/ha.



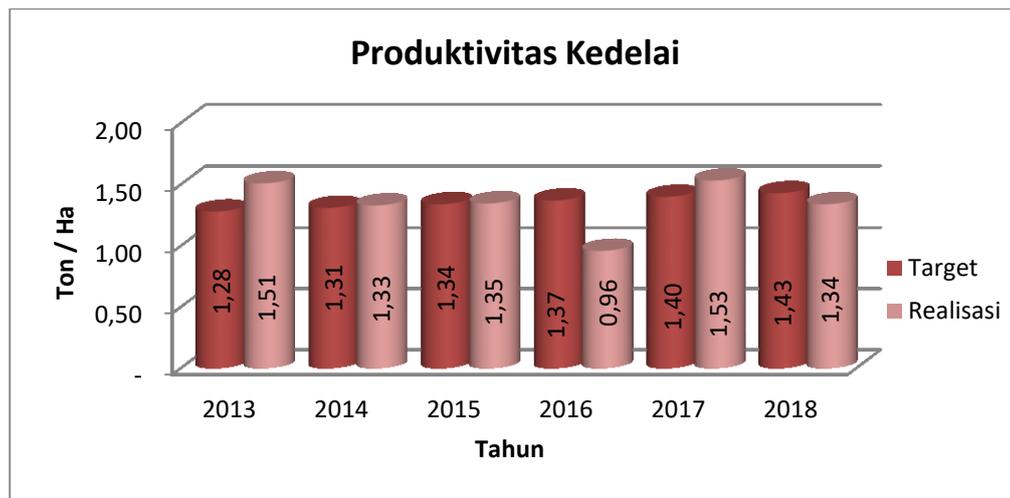
Gambar 2.5. Target dan realisasi produktivitas padi gogo tahun 2013-2018

Capaian produktivitas jagung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berturut-turut adalah 6,84 ton/ha, 6,10 ton/ha, 5,75 ton/ha, 5,25 ton/ha, 5,92 ton/ha dan 6,30 ton/ha.



Gambar 2.6. Target dan realisasi produktivitas jagung tahun 2013-2018

Capaian produktivitas kedelai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berturut-turut adalah 1,51 ton/ha, 1,33 ton/ha, 1,35 ton/ha, 0,96 ton/ha, 1,53 ton/ha dan 1,34 ton/ha.



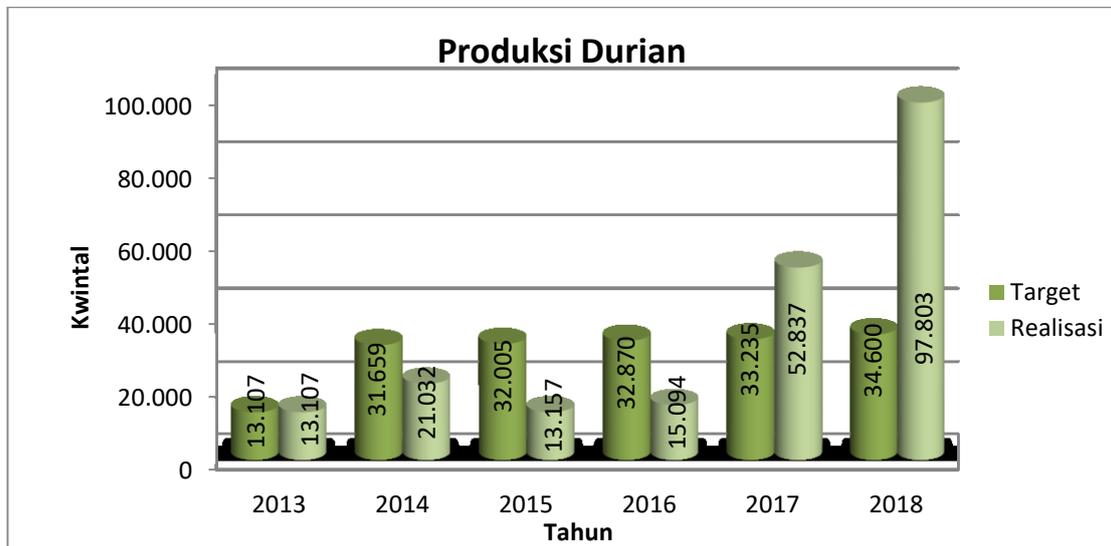
Gambar 2.7. Target dan realisasi produktivitas kedelai tahun 2013-2018

Produktivitas komoditas pertanian khususnya komoditas pangan utama selama tahun 2013-2018, di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1. Produktivitas padi dan bahan pangan Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018

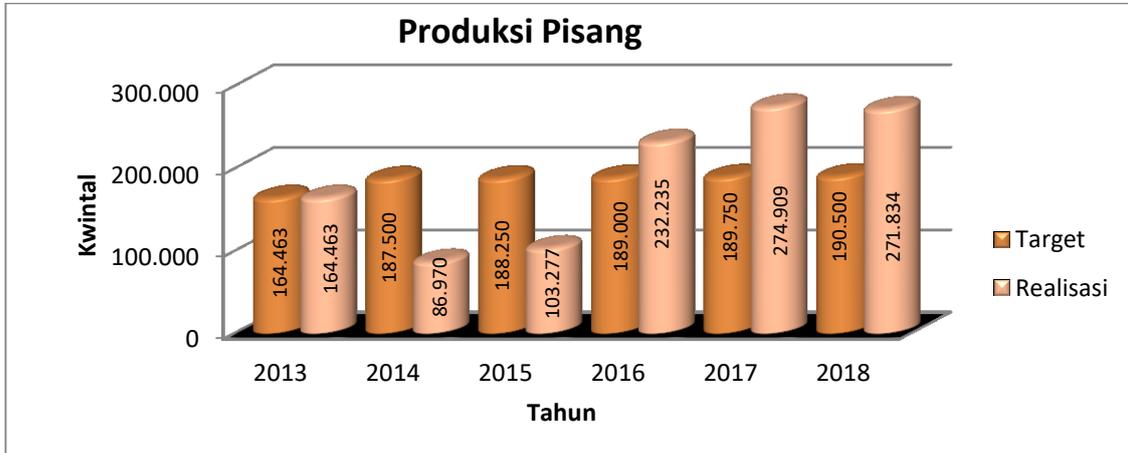
No	Uraian	Target	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Produktivitas padi (ton/ha)	5,37	5,26	4,93	5,36	5,17	4,97	5,76
2.	Produktivitas Padi Sawah (Ton/Ha)	6,24	5,45	4,98	5,75	5,63	5,57	5,80
3.	Produktivitas Padi Gogo (Ton/Ha)	4,50	5,06	4,88	4,97	4,70	4,38	3,56
4.	Produktivitas jagung (ton/ha)	7,50	6,84	6,10	5,75	5,26	5,92	6,30
5.	Produktivitas kedelai (ton/ha)	1,43	1,51	1,33	1,35	0,96	1,53	1,34

Capaian produksi durian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berturut-turut adalah 13.107 kwintal, 21.032 kwintal, 13.157 kwintal, 15.094 kwintal, 52.837 kwintal dan 97.803 kwintal.



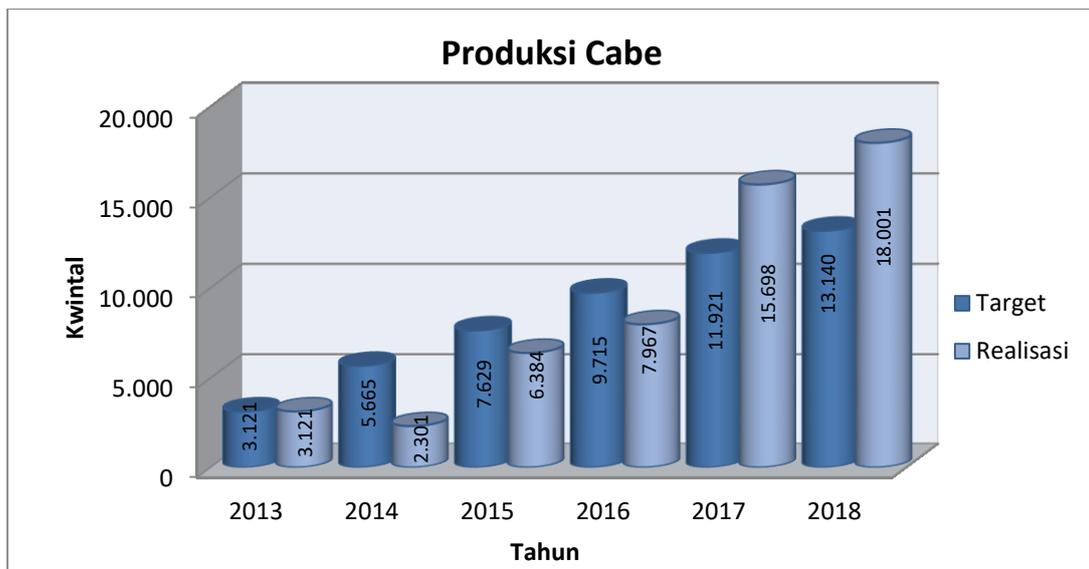
Gambar 2.8. Target dan realisasi produksi durian tahun 2013-2018

Capaian produksi pisang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berturut-turut adalah 614.463 kwintal, 86.970 kwintal, 103.277 kwintal, 232.235 kwintal, 274.909 kwintal dan 271.834 kwintal.



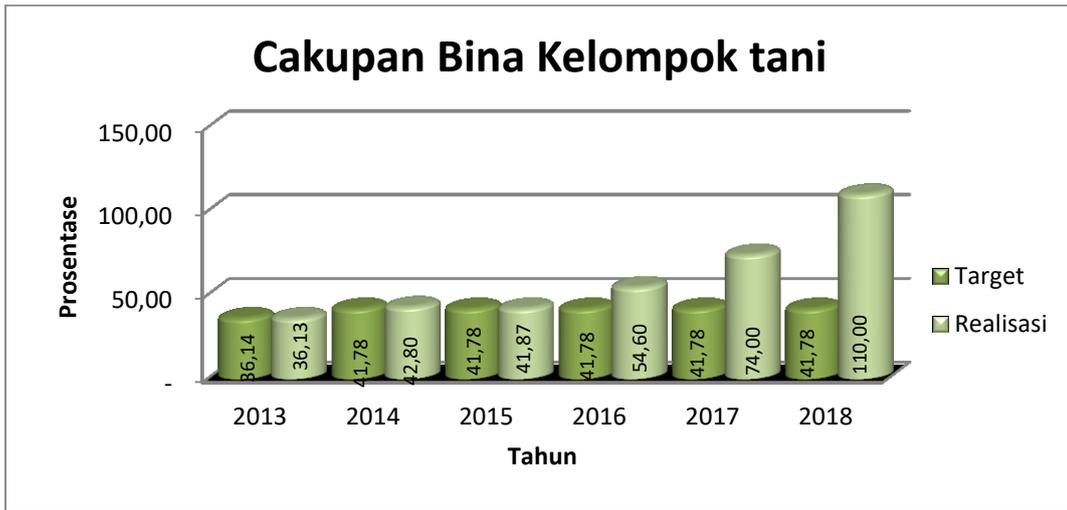
Gambar 2.9. Target dan realisasi produksi pisang tahun 2013-2018

Capaian produksi cabe dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berturut-turut adalah 3.121 kwintal, 2.301 kwintal, 6.384 kwintal, 7.967 kwintal, 156.698 kwintal dan 18.001 kwintal



Gambar 2.10. Target dan realisasi produksi cabe tahun 2013-2018

Cakupan bina kelompok tani dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berturut-turut adalah 36,13 persen, 42,80 persen, 41,87 persen, 54,60 persen, 74,00 persen, dan 110,00 persen.



Gambar 2.11. Target dan realisasi bina kelompok tani tahun 2013-2018

Tabel. 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
A	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar																			
1	Produktivitas padi (ton/ha)	5,12	5,17	5,22	5,27	5,32	5,37	5,26	4,93	5,36	5,17	4,97	4,68	97,34	104,87	97,39	101,93	107,04	114,74	
2	Produktivitas Padi Sawah (Ton/Ha)	5,99	6,04	6,09	6,14	6,19	6,24	5,45	4,98	5,75	5,63	5,57	5,8	109,91	121,29	105,91	109,06	111,13	107,59	
3	Produktivitas Padi Gogo (Ton/Ha)	4,25	4,3	4,35	4,4	4,45	4,5	5,06	4,88	4,97	4,7	4,38	3,56	83,99	88,11	87,53	93,62	101,60	126,40	
4	Produktivitas jagung (ton/ha)	6	6,2	6,4	6,7	7,1	7,5	6,84	6,1	5,75	5,26	5,92	6,3	87,72	101,64	111,30	127,38	119,93	119,05	
5	Produktivitas kedelai (ton/ha)	1,28	1,31	1,34	1,37	1,4	1,43	1,51	1,33	1,35	0,96	1,53	1,34	84,77	98,50	99,26	142,71	91,50	106,72	
B	Produksi Hortikultura																			
1	Durian (kuintal)	13.107	31.659	32.005	32.870	33.235	34.600	13.107	21.032	13.157	15.094	52.837	97.803	100,00	150,53	243,25	217,77	62,90	35,38	
2	Pisang (kuintal)	164.463	187.500	188.250	189.000	189.750	190.500	164.463	86.970	103.277	232.235	274.909	271.834	100,00	215,59	182,28	81,38	69,02	70,08	
3	Cabe besar (kuintal)	3.121	5.665	7.629	9.715	11.921	13.140	3.121	2.301	6.384	7.967	15.698	18.001	100,00	246,20	119,50	121,94	75,94	73,00	
C	Produksi Tanaman Perkebunan																			
1	Cengkeh (ton)	232,95	262,95	292,95	322,95	352,95	382,95	232,95	414,55	221,48	494,11	310,41	484,16	100,00	63,43	132,27	65,36	113,70	79,10	
2	Kelapa Dalam (ton)	13.192,41	13.492,41	13.792,41	14.092,41	14.392,41	14.962,41	13.192,41	13.303,27	13.494,80	12.822,41	13.283,89	13.905,12	100,00	101,42	102,21	109,90	108,34	107,60	
3	Kelapa Deres (ton)	52.164,56	53.114,56	53.614,56	54.114,56	54.614,56	55.114,56	52.164,56	49.568,52	53.868,00	43.938,68	54.730,50	53.408,86	100,00	107,15	99,53	123,16	99,79	103,19	

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
D	Kelembagaan Petani																			
1	Jumlah Kelompok tani dan kelompok masyarakat yang terbina	1500	1500	1500	1500	1500	1500	542	642	628	819	1.110	1650	276,75	233,64	238,85	183,15	135,14	90,91	
2	Cakupan bina kelompok tani (%)	36,14	41,78	41,78	41,78	41,78	41,78	36,13	42,8	41,87	54,6	74	110	100,03	97,62	99,79	76,52	56,46	37,98	
3	Jumlah Kelompok tani yang aktif	1500	1500	1500	1500	1500	1.681	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.686,00	111,44	111,44	111,44	111,44	111,44	99,70	
E	Ketahanan Pangan																			
1	Ketersediaan energi dan protein perkapita (%)	94	94	94	94	91	94	94	94	94	89	91	94	100,00	100,00	100,00	105,62	100,00	100,00	
2	Penguatan cadangan pangan (%)	75	75	75	75	70	75	75	75	75	65	70	75	100,00	100,00	100,00	115,38	100,00	100,00	
3	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah kondisi awal (%)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	92	95	95	100,00	100,00	100,00	103,26	100,00	100,00	
5	Skor pola pangan harapan (%)	90	90	90	90	88	90	90	90	90	90	90	90,01	90,2	100,00	100,00	100,00	100,00	97,77	99,78
6	Pengawasan dan pembinaan pangan (%)	75	75	75	75	70	75	75	75	75	67	70	93,43	100,00	100,00	100,00	111,94	100,00	80,27	
7	Penanganan daerah rawan pangan (%)	64	64	64	64	62	64	64	64	64	62	62	62	100,00	100,00	100,00	103,23	100,00	103,23	

Selain dalam bentuk indikator makro dan produksi, kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari capaian dalam bentuk dukungan peningkatan produksi, antara lain dukungan APBD Kabupaten Banyumas untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan selama periode tahun 2013-2018, memperlihatkan peningkatan.

Sementara itu, dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dan Bidang Ketahanan Pangan serta APBN (Tugas Pembantuan) pun memiliki sumbangsih yang sangat bermakna bagi percepatan pembangunan sektor pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Banyumas.

Guna mendukung peningkatan produksi pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian yang mencakup Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) serta Jalan Usaha Tani (JUT).

2. 4. Tantangan dan Peluang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pembangunan pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Banyumas guna menghadapi tantangan-tantangan antara lain :

1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi, yang mengakibatkan ketersediaan dan kepemilikan lahan pertanian yang semakin sempit
2. Kesuburan lahan pertanian yang semakin menurun yang dapat mengakibatkan menurunnya produksi dan produktivitas pertanian
3. Perubahan iklim yang sulit diperkirakan. Ancaman perubahan iklim global yang berdampak pada perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang menyebabkan bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan

keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

4. Keterbatasan tenaga muda di sektor pertanian dan kurangnya minat generasi penerus pada sektor pertanian. Keterbatasan sumber daya petani dalam peningkatan manajemen usaha tani dan transfer teknologi.
5. Lokasi pertanian dan perkebunan terpencar dengan luasan lahan budidaya yang relatif kecil, sehingga menyebabkan biaya angkut tinggi dan kurang efisien, sementara harga pangan tidak stabil.
6. Penanganan panen dan pasca panen yang sebagian besar masih bersifat relatif tradisional.
7. Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman.
8. Akses pangan masyarakat yang tidak merata

Namun demikian faktor-faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang bagi berkembangnya organisasi dimasa depan adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan produk pertanian semakin meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Kebutuhan terhadap kuantitas dan kualitas produk pertanian baik dalam negeri maupun luar negeri semakin meningkat, hal ini merupakan potensi pasar yang luas.
2. Keanekaragaman komoditas pertanian cukup tinggi baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun sumber hayati lain.
3. Tersedianya teknologi budidaya yang mudah diterapkan baik spesifik lokasi maupun teknologi baru. Perkembangan teknologi pertanian yang semakin baik memberikan peluang

dalam pengembangan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan

4. Adanya berbagai program dan kegiatan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian.
5. Potensi pangan yang cukup besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman
6. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian dan Ketahanan Pangan melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Persoalan mendasar yang dihadapi terkait fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas pada saat ini dan di masa yang akan datang adalah :

- a. Keterbatasan jumlah sarana prasarana penunjang pelayanan.
- b. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia.
- c. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan pupuk dan obat-obatan pertanian dan meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia. Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang. Tantangan ke depan adalah bagaimana mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

Disamping itu, petani belum sepenuhnya menerapkan pola tanam secara tertib dalam rangka pencegahan serangan OPT

- d. Penggunaan benih yang tidak layak (kurang bermutu)

Keterbatasan ketersediaan benih/bibit unggul bermutu, mengakibatkan petani menggunakan benih/bibit yang kurang bermutu. Pengembangan usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi perlu ditingkatkan guna menghindari harga benih/bibit menjadi mahal, dan

meningkatkan ketersediaan benih benih/bibit yang berkualitas.

- e. Keterbatasan prasarana dan sarana pertanian, dan penyebaran yang tidak merata, serta infrastruktur pertanian masih kurang memadai.

Prasarana pertanian yang keberadaannya sangat memprihatinkan saat ini adalah infrastruktur irigasi antara lain kurangnya waduk/embung/bangunan penyimpan air dan jaringan irigasi yang rusak, dan keterbatasan sumber air pertanian. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan.

Prasarana lain yang sangat dibutuhkan masyarakat pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi dan pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas pertanian. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau.

- f. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan terjadinya degradasi lahan pertanian

Pesatnya laju pembangunan di berbagai bidang yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lahan telah membawa implikasi pemanfaatan lahan pertanian. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan,

baik melalui pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan baru.

g. Pendapatan petani masih rendah

Konversi lahan pertanian menyebabkan kapasitas produksi pertanian menurun, mengakibatkan semakin sempitnya luas garapan usahatani sehingga menurunkan pendapatan petani. Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya akibatnya oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi kesejahteraan petani.

h. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan

Permasalahan belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan ini memberikan andil pada menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga perlu dipacu untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Penyebab dari munculnya isu ini antara lain luas panen padi atau bahan pangan lainnya dipengaruhi oleh pola tanam petani dan iklim, lama musim penghujan, yang secara umum menjadi penentu jenis tanaman yang akan ditanam sebagian besar di Kabupaten Banyumas. Produktivitas Padi pada tahun 2016 mencapai sebesar 5,25 ton/ha; Padi Gogo sebesar 4,0 ton/ha; tanaman Jagung sebesar 6,58% dan Kedelai mencapai sebesar 1,67 ton/ha tanaman Kelapa

Dalam sebesar 12.892,41 ton; Kelapa Deres sebesar 52.114,56 ton; tanaman Cengkeh sebesar 202,95 ton.

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan.

Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi dan produktivitas pertanian.

i. Belum optimalnya konsumsi energi dan protein per kapita

Pangan dan gizi terkait sangat erat dengan upaya peningkatan sumberdaya manusia. Ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh penduduk di suatu wilayah belumlah dapat digunakan sebagai jaminan akan terhindarnya penduduk dari masalah pangan dan gizi, karena selain ketersediaan, juga perlu diperhatikan aspek pola konsumsi atau keseimbangan kontribusi di antara jenis pangan yang dikonsumsi, sehingga memenuhi standar gizi tertentu. Kekurangan konsumsi gizi bagi seseorang dari standar minimum tersebut umumnya akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, aktivitas dan produktivitas kerja. Dalam jangka panjang kekurangan konsumsi pangan dari sisi jumlah dan kualitas (terutama pada anak balita) akan berpengaruh terhadap kualitas SDM. Dalam hal ini, kecukupan energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat dan juga keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pangan, pertanian, kesehatan, dan sosial ekonomi secara terintegrasi. Bahwa derajat ketahanan

pangan rumah tangga secara sederhana dapat ditentukan dengan mengevaluasi asupan energi dan protein rumah tangga tersebut

j. Masih kurangnya desa mandiri pangan.

Desa Mandiri Pangan sejalan dengan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin di desa terkategori daerah rawan dan rentan pangan. Strategi yang dilakukan adalah melalui peningkatan peran Pemangku Kepentingan dalam bentuk : peningkatan usaha ekonomi produktif, peningkatan kualitas konsumsi, penguatan cadangan pangan, peningkatan pendapatan, menjamin ketersediaan pangan dan peningkatan peran kelembagaan masyarakat.

k. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan.

Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah.

Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

Permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi. Stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi

harus didistribusikan antar daerah/antar pulau. Namun tidak jarang sarana dan prasarana distribusi masih terbatas dan kadang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri

Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan di perdesaan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/twin track strategy, yaitu : (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung

1. Upaya penguatan cadangan pangan yang belum optimal.

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu paling strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah, perhatian terhadap ketahanan pangan (*food security*) mutlak diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan sosial (*social security*), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan. Ketahanan pangan diartikan sebagai kemampuan suatu pemerintah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak dan aman.

Ketahanan pangan dibangun atas kemampuan sendiri, yaitu didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Ketahanan pangan diklasifikasikan mulai dari ketahanan pangan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta ketahanan pangan rumah tangga dan perseorangan.

Memahami pentingnya Ketahanan Pangan, pemerintah mengatur hal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa ketahanan

pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan Perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam dan bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan hal ini adalah dengan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah menyelenggarakan, membina dan atau mengkoordinasikan segala upaya untuk mewujudkan cadangan pangan nasional.

Di samping itu, pemerintah juga perlu untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat dan adanya spekulasi dan manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan.

Pemerintah daerah sangat berperan dalam ketahanan pangan karena merupakan ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Pemerintah Daerah juga dapat merespon secara cepat persoalan ketahanan pangan seperti kerawanan pangan, yang terjadi pada bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial lainnya. Di samping itu daerah memiliki sumberdaya untuk mengatasi persoalan pangan melalui peningkatan produksi komoditas pangan dan meningkatkan kualitas konsumsi pangan.

Dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat masyarakat sudah saatnya Pemerintah Kabupaten mengembangkan sebuah sistem cadangan pangan yang mandiri.

Khususnya untuk mengatasi kerawanan pangan yang bersifat transien yang disebabkan oleh bencana alam yang

kecenderungannya semakin sering terjadi dan bersifat lokal. Sistem cadangan pangan pemerintah daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel

m. Menurunnya pengembangan lembaga distribusi pangan.

Organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial kemasyarakatan dan sebagian besar berorientasi untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi secara komersial melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan kedepan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

n. Masih kurangnya tingkat kompetensi SDM penyuluh

Keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya ditentukan oleh kondisi sumberdaya pertanian, tetapi juga ditentukan oleh peran penyuluh pertanian yang sangat strategis dan kualitas sumberdaya manusia yang mendukungnya, yaitu SDM yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan.

Pada posisi ini pelaku dunia penyuluhan (penyuluh pertanian) sebagai pendamping dan fasilitator pelaku utama dan pelaku usaha diharapkan mampu memanfaatkan

perkembangan teknologi informasi dalam upaya mempercepat deseminasi teknologi pertanian pada pelaku utama dan pelaku usaha. Namun pada sisi lain penyuluh pertanian masih banyak ditemukan memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengakses informasi dan teknologi, baik karena keterbatasan keterampilan maupun keterbatasan dalam peralatan.

3. 2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Banyumas merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada periode tahun 2013–2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada periode perencanaan, maka visi tersebut merupakan visi Kabupaten Banyumas yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, yaitu

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan

ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik

Misi ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan

Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal

Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas mengemban krida ke – 4 dari hasta krida Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu **“Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan”**

Dalam rangka mengarahkan pencapaian visi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, maka berdasarkan misi yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai dengan indikator kerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel. 3.1. Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat												
1. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik		1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	79,24	NA	81	82	83	84	85	85
	1	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara	1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,79	82,8	83,1	83,4	83,6	83,6	83,7
	2	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skor	60,22	NA	68	70	72	76	80
2. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah		2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	3	Persentase SILPA	%	11,85	11	10,5	10,3	10,2	10,1	10
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis TIK		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,24	NA	81	82	83	84	85	85
	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis TIK	4	Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	-	3,23	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
Misi 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan												
1. Meningkatkan mutu pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat		4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,75	71,35	71,95	72,55	73,15	73,75	74,35	74,35
	1	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal	5	Rata-rata lama sekolah	%	8,04	8,06	8,08	8,1	8,12	8,14	8,16
			6	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	12,63	12,78	12,93	13,08	13,23	13,38	13,53
	2	Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	7	Angka Harapan Hidup	Angka	73,33	73,43	73,53	73,63	73,73	73,83	73,93
2. Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan		5	Persentase penduduk miskin	%	17,05	16,75	16,45	16,15	15,85	15,55	15,25	15,25
		6	Indeks Gini	Indeks	0,31	0,309	0,308	0,307	0,306	0,305	0,304	0,3
		7	Indeks Williamson	Indeks	0,3496	0,3456	0,3416	0,3376	0,3336	0,3296	0,3256	0,3256
	1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	NA	67,4	67,45	67,5	67,55	67,57	67,6
			9	Kota Layak Anak	Angka	426	514	550	600	650	700	750
	2	Meningkatnya perlindungan sosial	10	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial yang terjamin	%	2,16	5,48	47,91	49	50,1	51,19	52,29

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Misi 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan														
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	8	Pertumbuhan Ekonomi	Angka	6,34	6,35	6,4	6,45	6,5	6,6	6,65	6,65		
		9	Inflasi	Angka	3,91	4 + 1	4 + 1	4 + 1	4 + 1	4 + 1	4 + 1	4 + 1		
		10	PDRB per kapita	Angka (juta)	27,38	29,23	31,115	33	34,885	36,77	38,655	38,655		
		11	NTP	Angka	100,08	100,33	100,83	101,33	101,84	102,35	102,86	102,86		
		1	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	11	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Angka	2,78	2,98	3,38	3,78	3,98	4,03	4,33	4,33
				12	Persentase Kepemilikan Kartu Tani	%	70	80	84	87	91	95	100	100
				13	Rasio Safety belt	%	0	0	20	20	20	20	20	100
		2	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa	14	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	NA	6,03	6,28	6,53	6,78	7,03	7,28	7,28
				15	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	%	7,4	-	7,41	7,42	7,43	7,44	7,45	7,45
16	Gula Kelapa Terekspor			Ton	6.000	7.200	10.000	12.000	18.000	24.000	30.000	30.000		
Misi 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan														
1	Meningkatkan kemandirian pangan	12	Skor Pola Pangan Harapan	%	90,1	90,5	90,8	91	91,2	91,4	91,6	91,6		
		1	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	17	Produksi Padi	Ton/Ha	375.000	390.000	400.000	425.000	450.000	475.000	500.000	500.000
Misi 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan														
1	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	13	Nilai investasi Daerah	rupiah (Milyar)	583,4	670	675	680	685	690	695	695		
		14	Tingkat pengangguran terbuka		4,62	4,49	4,36	4,23	4,06	3,93	3,76	3,76		
		1	Pembangunan kawasan industri dengan meningkatkan investasi padat karya	18	Nilai Investasi di Kawasan Industri	rupiah (Milyar)	0	0	0	0	0	0	100	200
				19	Rasio Serapan Tenaga Kerja	Angka	NA	7,2	7,45	7,65	8,39	8,57	8,71	8,71
		2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yg berwawasan lingkungan	20	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	0	0	82,61	83,20	84,62	85,77	87,04	87,04
21	Indeks kualitas lingkungan hidup			Indeks	-	52,8	53	53,2	53,4	54,6	54	54		

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	15	Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik	%	87,31	89,42	90,93	93,95	95,46	96,97	100	100		
		1	Meningkatnya infrastruktur bina marga, sumberdaya air dan sarana prasarana pemerintahan	22	Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	%	71,03	56,49	61,49	66,49	71,49	76,49	81,49	81,49
				23	Persentase Infrastruktur sumberdaya air dalam kondisi baik	%	71,8	72,55	73,3	74,05	74,8	75,55	78,8	78,8
				24	Ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan terpadu	Unit	0	0	0	0	0	1	1	1
		2	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang Layak	25	Luas pemukiman kumuh	Ha	205	205	195	185	175	165	155	155
				26	Persentase rumah tangga berakses air minum	%	69,5	70,54	71,94	73,37	74,46	75,58	77,08	77,08
				27	Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi	%	75	80	83	86	89	92	95	95
3	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	28	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%	35	41	45	48	50	55	57	57		
3	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif.	16	Pertumbuhan Industri Kreatif yang mendukung Pariwisata	%	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	
		1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Wisatawan	2.111.861	1.372.252	1.620.492	1.881.083	2.154.161	2.440.139	2.744.504	2.744.504		
		2	Berkembangnya Industri Kreatif	Angka	2	2	3	4	5	6	7	7		
4	Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui UMKM dan IKM berbasis potensi lokal	17	Pertumbuhan UMKM dan IKM	%	0,34	1,05	1,75	2,49	3,27	4,08	4,92	4,92		
		1	Meningkatnya pertumbuhan usaha dan industri kecil dan menengah	31	Jumlah UMKM	Angka	66.689	66.729	66.779	66.829	66.879	66.929	66.979	
Misi 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius														
1	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam	18	Indeks Toleransi	%	20	15	15	14	13	10	9	9		
		1	Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara	32	Persentase konflik sosial, SARA, dll. yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	

Misi / Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
kehidupan masyarakat	2	Meningkatnya kelestarian Seni Budaya daerah	33	Persentase pelestarian situs dan seni budaya Banyumas yang hampir punah	%	-	-	15,38	30,77	53,85	76,92	100	100
	3	Mengembangkan potensi pemuda dan olah raga	34	Persentase peningkatan perolehan medali tingkat provinsi dan nasional	%	-	-	16	34	54	80	100	100
	4	Meningkatnya budaya baca masyarakat	35	Persentase budaya baca masyarakat	%	2,8	2,86	2,87	2,88	2,89	2,91	2,93	2,93

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Table 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan</p> <p>Tujuan : Meningkatkan kemandirian pangan</p> <p>Sasaran : 1) Meningkatkan ketersediaan pangan utama</p>	<p>a. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan pupuk dan obat-oban pertanian dan meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia.</p> <p>b. Penggunaan benih yang tidak layak (kurang bermutu)</p> <p>c. Keterbatasan prasarana dan sarana pertanian, dan penyebaran yang tidak merata, serta infrastruktur pertanian masih kurang memadai.</p> <p>d. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan terjadinya</p>	<p>a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi.</p> <p>b. Kesuburan lahan pertanian yang semakin menurun.</p> <p>c. Perubahan iklim yang sulit diperkirakan.</p> <p>d. Keterbatasan tenaga muda di sektor pertanian dan kurangnya minat generasi penerus pada sektor pertanian.</p> <p>e. Lokasi pertanian dan perkebunan terpencar dengan luasan</p>	<p>a. Kebutuhan produk pertanian semakin meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat.</p> <p>b. Keanekaragaman komoditas pertanian cukup tinggi baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun sumber hayati lain.</p> <p>c. Tersedianya teknologi budidaya yang mudah diterapkan baik spesifik lokasi maupun teknologi baru.</p> <p>d. Adanya berbagai program dan kegiatan dari pemerintah pusat maupun</p>

		degradasi lahan pertanian e. Pendapatan petani masih rendah f. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan g. Masih kurangnya tingkat kompetensi SDM penyuluh h. Belum optimalnya konsumsi energi dan protein perkapita i. Masih kurangnya desa mandiri pangan j. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan k. Upaya penguatan cadangan pangan yang belum optimal l. Menurunnya pengembangan lembaga distribusi pangan	lahan budidaya yang relatif kecil f. Penanganan panen dan pasca panen yang sebagian besar masih bersifat relatif tradisional. g. Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman. h. Akses pangan masyarakat yang tidak merata	pemerintah daerah e. Potensi pangan yang cukup besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman f. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian dan Ketahanan Pangan
--	--	--	--	---

3. 3. Telaahan RENSTRA Kementerian Pertanian

Sektor pertanian, perkebunan dan Ketahanan Pangan telah berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan PDB, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

1. VISI Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah:
 Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang

Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

2. MISI Kementerian Pertanian

- a. Mewujudkan kedaulatan pangan.
- b. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
- c. Mewujudkan kesejahteraan petani.
- d. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

3. Tujuan Kementerian Pertanian

- a. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
- c. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
- d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
- e. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

4. Sasaran Kementerian Pertanian

- a. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
- b. Peningkatan diversifikasi pangan
- c. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor
- d. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
- e. Peningkatan pendapatan keluarga petani
- f. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Table 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>a. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula</p> <p>b. Peningkatan diversifikasi pangan</p> <p>c. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor</p> <p>d. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi</p> <p>e. Peningkatan pendapatan keluarga petani</p> <p>f. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik</p>	<p>a. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan pupuk dan obat-obatan pertanian dan meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia.</p> <p>b. Penggunaan benih yang tidak layak (kurang bermutu)</p> <p>c. Keterbatasan prasarana dan sarana pertanian, dan penyebaran yang tidak merata, serta infrastruktur pertanian masih kurang memadai.</p> <p>d. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan terjadinya degradasi lahan pertanian</p> <p>e. Pendapatan petani masih rendah</p> <p>f. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan</p> <p>g. Masih kurangnya tingkat kompetensi SDM penyuluh</p> <p>h. Belum optimalnya</p>	<p>a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi.</p> <p>b. Kesuburan lahan pertanian yang semakin menurun.</p> <p>c. Perubahan iklim yang sulit diperkirakan.</p> <p>d. Keterbatasan tenaga muda di sektor pertanian dan kurangnya minat generasi penerus pada sektor pertanian.</p> <p>e. Lokasi pertanian dan perkebunan terpencar dengan luasan lahan budidaya yang relatif kecil</p> <p>f. Penanganan panen dan pasca panen yang sebagian besar masih bersifat relatif tradisional.</p> <p>g. Pola konsumsi masyarakat</p>	<p>a. Kebutuhan produk pertanian semakin meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat.</p> <p>b. Keanekaragaman komoditas pertanian cukup tinggi baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun sumber hayati lain.</p> <p>c. Tersedianya teknologi budidaya yang mudah diterapkan baik spesifik lokasi maupun teknologi baru.</p> <p>d. Adanya berbagai program dan kegiatan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah</p> <p>e. Potensi pangan yang cukup besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola</p>

		konsumsi energi dan protein perkapita i. Masih kurangnya desa mandiri pangan j. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan k. Upaya penguatan cadangan pangan yang belum optimal l. Menurunnya pengembangan lembaga distribusi pangan	yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman. h. Akses pangan masyarakat yang tidak merata	secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman f. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian dan Ketahanan Pangan
--	--	--	--	---

3. 4. Telaahan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Pangan adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, sehingga pemerintah wajib hadir dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan bagi negara dan perseorangan. Berdasarkan amanat undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, dengan berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan. Pembangunan Kedaulatan pangan adalah hak rakyat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan secara mandiri kebijakan pangan yang menjamin hak atas Pangan masyarakat.

1. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Tujuan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk

memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100).

Dipilihnya indikator Skor PPH, karena meskipun pangan tersedia dalam jumlah yang cukup bahkan berlebih namun bila tidak dapat terjangkau dan dikonsumsi, maka belum dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia. Untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif dan berkelanjutan, manusia harus mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

2. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan indikator PPH Ketersediaan (skor), Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) dan Angka Konsumsi Protein (gram/kapita/hari).

Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah dan Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang ditunjukkan dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Table 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Ketahanan Pangan	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>a. meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan indikator PPH Ketersediaan (skor),</p> <p>b. Angka Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) dan</p> <p>c. Angka Konsumsi Protein (gram/kapita/hari).</p> <p>d. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan</p> <p>e. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p> <p>f. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</p>	<p>a. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan pupuk dan obat-obatan pertanian dan meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia.</p> <p>b. Penggunaan benih yang tidak layak (kurang bermutu)</p> <p>c. Keterbatasan prasarana dan sarana pertanian, dan penyebaran yang tidak merata, serta infrastruktur pertanian masih kurang memadai.</p> <p>d. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan terjadinya degradasi lahan pertanian</p> <p>e. Pendapatan petani masih rendah</p> <p>f. Belum optimalnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan</p> <p>g. Masih kurangnya</p>	<p>a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi.</p> <p>b. Kesuburan lahan pertanian yang semakin menurun.</p> <p>c. Perubahan iklim yang sulit diperkirakan.</p> <p>d. Keterbatasan tenaga muda di sektor pertanian dan kurangnya minat generasi penerus pada sektor pertanian.</p> <p>e. Lokasi pertanian dan perkebunan terpencar dengan luasan lahan budidaya yang relatif kecil</p> <p>f. Penanganan panen dan pasca panen yang sebagian besar masih bersifat relatif tradisional.</p> <p>g. Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam, bergizi seimbang dan</p>	<p>a. Kebutuhan produk pertanian semakin meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat.</p> <p>b. Keanekaragaman komoditas pertanian cukup tinggi baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun sumber hayati lain.</p> <p>c. Tersedianya teknologi budidaya yang mudah diterapkan baik spesifik lokasi maupun teknologi baru.</p> <p>d. Adanya berbagai program dan kegiatan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah</p> <p>e. Potensi pangan yang cukup besar dan beragam dan tersedianya</p>

		<p>tingkat kompetensi SDM penyuluh</p> <p>h. Belum optimalnya konsumsi energi dan protein perkapita</p> <p>i. Masih kurangnya desa mandiri pangan</p> <p>j. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan</p> <p>k. Upaya penguatan cadangan pangan yang belum optimal</p> <p>l. Menurunnya pengembangan lembaga distribusi pangan</p>	<p>aman.</p> <p>h. Akses pangan masyarakat yang tidak merata</p>	<p>lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman</p> <p>f. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian dan Ketahanan Pangan</p>
--	--	--	--	--

3. 5. Telaahan RENSTRA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2013-2018, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan. Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2013- 2018 adalah memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah

Sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2013-2018 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.

Table 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. b. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan pupuk dan obat-obatan pertanian dan meningkatnya dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia. b. Penggunaan benih yang tidak layak (kurang bermutu) c. Keterbatasan prasarana dan sarana pertanian, dan penyebaran yang tidak merata, serta infrastruktur pertanian masih kurang memadai. d. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan terjadinya degradasi lahan pertanian e. Pendapatan petani masih rendah f. Belum optimalnya 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi. b. Kesuburan lahan pertanian yang semakin menurun. c. Perubahan iklim yang sulit diperkirakan. d. Keterbatasan tenaga muda di sektor pertanian dan kurangnya minat generasi penerus pada sektor pertanian. e. Lokasi pertanian dan perkebunan terpecah dengan luasan lahan budidaya yang relatif kecil f. Penanganan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan produk pertanian semakin meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. b. Keanekaragaman komoditas pertanian cukup tinggi baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun sumber hayati lain. c. Tersedianya teknologi budidaya yang mudah diterapkan baik spesifik lokasi maupun teknologi baru. d. Adanya berbagai program dan kegiatan dari pemerintah

		produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan g. Masih kurangnya tingkat kompetensi SDM penyuluh h. Belum optimalnya konsumsi energi dan protein perkapita i. Masih kurangnya desa mandiri pangan j. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan k. Upaya penguatan cadangan pangan yang belum optimal l. Menurunnya pengembangan lembaga distribusi pangan	panen dan pasca panen yang sebagian besar masih bersifat relatif tradisional. g. Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman. h. Akses pangan masyarakat yang tidak merata	pusat maupun pemerintah daerah e. Potensi pangan yang cukup besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman f. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian dan Ketahanan Pangan
--	--	--	---	--

3. 6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah: Rencana struktur tata ruang; Struktur tata ruang saat ini; Rencana pola ruang; Pola ruang saat ini; dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, diidentifikasi potensi wilayah Kabupaten Banyumas untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas 2011-2031.

Pengembangan kawasan budidaya dilakukan dengan memperhatikan asas kelestarian dan asas kesesuaian untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal. Asas kelestarian dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat dimasa yang akan datang dengan memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang. Sedangkan asas kesesuaian dimaksudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas kemanfaatan ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang optimal.

Table 3.6. Pemanfaatan Ruang Kabupaten Banyumas berdasarkan RTRW tahun 2011-2031

No	Kawasan Budidaya	Lokasi
1.	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kecamatan Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Sumpiuh, Tambak, Patikraja, Ajibarang, Gumelar, Somagede, Kalibagor, Banyumas, Purwojati, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, Kembaran dan Kecamatan Sokaraja, luas kurang lebih 36.616 Ha.
2.	Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan	
	a. Kawasan pertanian lahan basah kurang lebih 32.310 Ha	Meliputi Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Kebasen, Rawalo, Jatilawang, Purwojati
	b. Kawasan pertanian lahan kering kurang lebih 13.623 Ha	
3.	Kawasan peruntukan hortikultura	
4.	Kawasan peruntukan perkebunan	
5.	Kawasan peternakan	

3. 7. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, program yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya di bidang pertanian terkait dengan penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia pertanian dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

3. 8. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Perumusan isu strategis didasari dari berbagai permasalahan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Produksi dan produktivitas pertanian perlu ditingkatkan.
2. Keterbatasan tenaga kerja muda pada sektor pertanian.
3. Pendapatan dan kesejahteraan petani perlu ditingkatkan.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia petugas teknis pertanian
5. Ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahun
6. Potensi kerawanan pangan cukup tinggi
7. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4. 1. Tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah :

1. Meningkatkan penguatan cadangan pangan
2. Meningkatkan ketersediaan pangan utama
3. Meningkatkan Produksi Tanaman Pertanian

4. 2. Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan adalah :

- a. Meningkatnya ketahanan pangan
- b. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian
- c. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- d. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan.
- e. Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, Sumber Daya Manusia Pertanian, dan akses pasar

Untuk dapat memahami keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2018, maka dapat dilihat pada tabel 4.1. dibawah ini

Tabel 4.1. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Idikator Sasaran
1	Meningkatkan ketersediaan pangan utama	Ketersediaan pangan utama (%)	Meningkatkan Pola Pangan Harapan	Konsumsi energi perkapita perhari (Kkal)
				Konsumsi protein perkapita perhari (gram)
				Skor Pola Pangan Harapan(%)
				Pengawasan dan pembinaan pangan (%)
2	Meningkatkan penguatan cadangan pangan	penguatan cadangan pangan (%)	Meningkatnya Penguatan cadangan pangan	Tingkat Ketersediaan energi perkapita (%)
				Tingkat Ketersediaan protein perkapita (%)
				Ketersediaan informasi pasokan , harga dan akses pangan (%)
				Stabilitas harga dan pasokan pangan (kali)
				Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)
3	Meningkatkan Produksi Tanaman Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian	Jumlah kelompok tani terlatih yang menerapkan tekhnologi dibagi Jumlah kelompok tani terlatih dikali 100
				Persentase penurunan serangan OPT (%)
			Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	Produksi Kelapa deres (ton)
				Produksi Kelapa Dalam (ton)
				Ratio kepemilikan sabuk Pengaman (safety belt) (persen)
				Produksi Kopi (ton)
				Produksi pala (ton)
				Produksi lada (ton)
				Produksi Cengkeh (ton)
				Produksi tembakau (ton)
				Jumlah benih perkebunan (batang)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Idikator Sasaran
			Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan hortikultura	Produksi padi sawah (Ton)
				Produksi padi gogo (Ton)
				Produksi jagung (Ton)
				Produksi kedelai (Ton)
				Produksi Durian (kuintal)
				Produksi pisang (kuintal)
				Produksi Cabe (kuintal)
				Jumlah benih tanaman pangan (ton)
				Jumlah benih hortikultura (batang)
				Jumlah benih tanaman perkebunan (batang)
			Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, Sumber Daya Manusia Pertanian, dan akses pasar	Persentase Penyuluh Pertanian Terlatih (%)
				Cakupan bina kelompok petani (%)
				Jumlah pendampingan kelompok tani pelaku usaha agibisnis (kelompok)
				Jumlah kegiatan promosi produk pertanian (kali)
				Produksi Hasil Olahan Pertanian (ton)

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2018-2023

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula/Rumus	satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program					
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
	Urusan Pangan											
1	Program Peningkatan Pola Pangan Harapan	Konsumsi Protein	Konsumsi Protein per kapita per hari	gram/ kap/ hari	45,17	45,20	48,15	50,53	52,55	54,80	57,00	57,00
2		Konsumsi Energi	Konsumsi energi per kapita per hari	kkal/ kap/ hari	2.391	2.396	2.401	2.406	2.411	2.416	2.421	2.421
3		Skor pola pangan harapan (%)	Nilai Skor pola pangan harapan (%)	prosentase	90,00	90,20	90,80	91,00	91,20	91,40	91,60	91,60
4		Pengawasan dan pembinaan pangan (%)	Jumlah bahan pangan yang layak konsumsi dibagi jumlah bahan pangan yang diuji kali 100	prosentase	70,00	92,43	93,43	94,43	95,43	96,43	97,43	97,43
5	Program Penguatan Cadangan Pangan	Tingkat Ketersediaan energi (%)	Ketersediaan energi dibanding kebutuhan energi dikali 100	Persentase	91,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00
6		Tingkat Ketersediaan protein (%)	Ketersediaan protein dibanding kebutuhan proteiin dikali 100	Persentase	91,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00
7		Stabilitas harga dan pasokan pangan	Jumlah Stabilitas Harga seluruh komoditas DIBAGI jumlah komoditas terhitung	Persentase	95,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula/Rumus	satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program					
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
8		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani dibagi jumlah daerah rawan pangan kabupaten kali 100	Persentase	62,00	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00	67,00
	Urusan Pertanian											
9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Persentase kelompok tani terlatih yang menerapkan teknologi (%)	Jumlah kelompok tani terlatih yang menerapkan teknologi dibagi Jumlah kelompok tani terlatih dikali 100	Persentase	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
10	Program Perlindungan Tanaman	Persentase penurunan serangan OPT (%)	Jumlah kasus serangan OPT tahun n dikurangi Jumlah kasus serangan OPT tahun (n-1) dibagi Jumlah kasus serangan OPT tahun (n-1) dikali 100	Persentase	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
10	Program Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi tanaman kelapa deres	Jumlah Produksi tanaman kelapa deres	ton	54.730,5	53.408,86	54.830,6	55.388,9	55.952,8	56.522,3	57.097,5	279.792,1
11		Produksi tanaman kelapa dalam	Jumlah Produksi tanaman kelapa dalam	Ton	13.284	13.905,1	14.039,1	14.174,5	14.311,4	14.449,6	14.598,2	73.996,9
12		Produksi tanaman kopi	Jumlah Produksi tanaman kopi	ton	142,0	143,0	144,9	146,3	147,8	149,3	150,8	739,1

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula/Rumus	satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program					
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
13		Produksi tanaman pala	Jumlah Produksi tanaman pala	ton	25,97	36,35	38,97	41,62	44,29	47,00	49,73	221,60
14		Produksi tanaman lada	Jumlah Produksi tanaman lada	ton	58,77	59,36	59,95	60,55	61,16	61,77	62,39	305,81
15		Produksi tanaman cengkeh	Jumlah Produksi tanaman cengkeh	ton	310,00	484,16	486,81	489,97	493,17	496,40	499,66	2.950,17
16		Produksi tanaman tembakau	Jumlah Produksi tanaman tembakau	ton	14,00	14,00	14,41	14,56	14,70	14,85	15,00	73,53
17	Program Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi tanaman Durian	Jumlah Produksi tanaman Durian	ton	4.862,4	4.780,3	9.829,4	9.879,0	9.929,1	9.979,7	10.030,8	49.648,1
18		Produksi tanaman Pisang	Jumlah Produksi tanaman Pisang	ton	20.510,8	27.183,4	27.390,6	27.599,8	27.811,1	28.024,6	28.240,1	139.066,1
19		Produksi tanaman Cabai	Jumlah Produksi tanaman Cabai	ton	1.570	1.800,1	1.816,5	1.832,5	1.848,6	1.865,0	1.881,5	9.242,1
20		Produksi tanaman Padi	Jumlah Produksi tanaman Padi	ton	310.242	313.344	400.000	425.000	450.000	475.000	500.000	500.000
21		Produksi tanaman Jagung	Jumlah Produksi tanaman Jagung	ton	13.006,0	13.136,1	13.267	13.400,1	13.534,1	13.669,4	13.806,1	67.677,2
22		Produksi tanaman Kedelai	Jumlah Produksi tanaman Kedelai	ton	1.562,01	1.578,00	1.593,41	1.609,34	1.625,43	1.641,69	1.658,11	8.128,00

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
23		Produktivitas tanaman Padi	Produksi padi dibagi luas panen	ton/ha	5,57	5,63	5,77	5,89	6,01	6,13	6,25	6,25
24		Produktivitas tanaman Jagung	Produksi jagung dibagi luas panen	ton/ha	5,92	6,30	6,36	6,46	6,48	6,54	6,60	6,60
25		Produktivitas tanaman Kedelai	Produksi kedelai dibagi luas panen	ton/ha	1,53	1,34	1,36	1,38	1,39	1,41	1,43	1,43
26	Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian Terlatih	Jumlah Penyuluh Pertanian Terlatih dibagi jumlah penyuluh pertanian dikali 100	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27		Cakupan bina kelompok petani	Jumlah kelompok petani terbina dibagi jumlah kelompok tani dikali 100	Persentase	46,06	46,52	46,98	47,44	47,90	48,36	48,82	48,82
28	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian	Jumlah pendampingan kelompok tani pelaku usaha agibisnis	Jumlah pelaku usaha agibisnis yang didampingi	Kelompok	230	255	280	308	338	372	409	1.707
29		Jumlah produksi hasil olahan produk pertanian (kw)	Jumlah produksi hasil olahan produk pertanian	Kwintal	NA	NA	120	122	124	126	128	620
30		Jumlah kegiatan promosi produk pertanian (kali)	Jumlah kegiatan promosi produk pertanian (kali)	Kali	NA	NA	5	5	5	5	5	25,0

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program					
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
31	Program Penyediaan Benih Pertanian	Jumlah bibit tanaman pangan	Jumlah bibit tanaman pangan	Ton			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,0
32		Jumlah bibit tanaman hortikultura	Jumlah bibit tanaman hortikultura	Batang			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000,0
33		Jumlah bibit tanaman perkebunan	Jumlah bibit tanaman perkebunan	Batang			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000,0
34	Program Peningkatan Pengamanan Kerja Penderes	Jumlah petani penderes yang memiliki sabuk Pengaman (<i>safety belt</i>)	Jumlah petani penderes yang memiliki sabuk Pengaman (<i>safety belt</i>)	Orang				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Program Rutin:											
35	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan perkantoran selama satu tahun	Jumlah realisasi keuangan dibagi jumlah anggaran dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00
36	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	jumlah program pada renja dibagi jumlah program pada renstra dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100,00

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5. 1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan
2. Pengembangan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal
3. Promosi panganekaragaman pangan
4. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan
5. Pengawasan harga pangan strategis
6. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan pangan dan jaringan distribusi pangan
7. Pembinaan lumbung pangan masyarakat dan penyediaan cadangan pangan pemerintah
8. Pemberdayaan Masyarakat Pada Daerah Rawan Pangan
9. Peningkatan kemampuan dan kemauan penerapan teknologi pertanian
10. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman
11. Menjamin ketersediaan kebutuhan sarana produksi perkebunan dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat dan mutu yang tepat
12. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perkebunan
13. Menyediakan prasarana perkebunan yang memadai
14. Menjamin ketersediaan kebutuhan sarana produksi pertanian tanaman pangan dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat dan mutu yang tepat
15. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan
16. Menyediakan prasarana pertanian tanaman pangan yang memadai
17. Menjamin ketersediaan kebutuhan sarana produksi pertanian hortikultura dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat dan mutu yang tepat

18. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pertanian hortikultura
19. Menyediakan prasarana pertanian hortikultura yang memadai
20. Meningkatkan penyediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan
21. Mengembangkan jaringan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan
22. Meningkatkan mutu produk hasil pertanian dan perkebunan
23. Memberdayakan petani, kelembagaan petani dan penyuluh pertanian

5. 2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangs adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
2. Mengembangkan kelompok olahan pangan pokok lokal
3. Meningkatkan promosi penganekaragaman pangan
4. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen
5. Meningkatkan pengawasan mutu pangan
6. Meningkatkan mutu pangan segar asal tumbuhan
7. Meningkatkan sarana prasarana pengujian mutu pangan segar asal tumbuhan
8. Mengembangkan sistem distribusi pangan, akses pangan dan stabilisasi harga pangan
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan pangan dan jaringan distribusi pangan
10. Meningkatkan pembinaan lumbung pangan masyarakat dan penyediaan cadangan pangan pemerintah
11. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pada Daerah Rawan Pangan
12. Meningkatkan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman
13. Meningkatkan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman

14. Penyediaan sarana produksi pertanian tanaman pangan
15. Peningkatan pembinaan kelompok tani, teknis pertanian tanaman pangan
16. Pelatihan/pembinaan peningkatan kemampuan petani dalam penerapan teknologi di bidang pertanian tanaman pangan
17. Fasilitasi penyediaan infrastruktur pertanian tanaman pangan
18. Penyediaan sarana produksi pertanian hortikultura
19. Peningkatan pembinaan kelompok tani, teknis pertanian hortikultura
20. Pelatihan/pembinaan peningkatan kemampuan petani dalam penerapan teknologi di bidang pertanian hortikultura
21. Fasilitasi penyediaan infrastruktur pertanian hortikultura
22. Penyediaan sarana produksi perkebunan
23. Peningkatan pembinaan kelompok tani, teknis perkebunan
24. Pelatihan/pembinaan peningkatan kemampuan petani dalam penerapan teknologi di bidang perkebunan
25. Fasilitasi penyediaan infrastruktur perkebunan
26. Peningkatan ketersediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan
27. Fasilitasi bisnis dan promosi hasil pertanian dan perkebunan
28. Penerapan sistem manajemen mutu dalam proses budidaya dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan
29. Peningkatan pemberdayaan kelompok tani, kelembagaan tani dan penyuluh pertanian

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan penguatan cadangan pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan	Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
			Pengembangan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Mengembangkan kelompok olahan pangan pokok lokal
			Promosi penganekaragaman pangan	Meningkatkan promosi penganekaragaman pangan
			Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen
			Pengawasan harga pangan strategis	Meningkatkan pengawasan mutu pangan
2.	Meningkatkan ketersediaan pangan utama	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian	Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan pangan dan jaringan distribusi pangan	Meningkatkan mutu pangan segar asal tumbuhan
			Pembinaan lumbung pangan masyarakat dan penyediaan cadangan pangan pemerintah	Meningkatkan sarana prasarana pengujian mutu pangan segar asal tumbuhan
			Pemberdayaan Masyarakat Pada Daerah Rawan Pangan	Mengembangkan sistem distribusi pangan, akses pangan dan stabilisasi harga pangan
				Meningkatkan ketersediaan pangan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3.	Meningkatkan Produksi Tanaman Pertanian	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian	Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pertanian dan perkebunan	Pelatihan/pembinaan peningkatan kemampuan petani dalam penerapan teknologi di bidang pertanian dan perkebunan
			Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman	Meningkatkan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman
				Meningkatkan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman
		Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan	Menjamin ketersediaan kebutuhan sarana produksi perkebunan dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat dan mutu yang tepat	Penyediaan sarana produksi pertanian perkebunan
			Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perkebunan	Peningkatan pembinaan kelompok tani, teknis pertanian perkebunan
			Menyediakan prasarana perkebunan yang memadai	Pelatihan/pembinaan peningkatan kemampuan petani dalam penerapan teknologi di bidang perkebunan
				Fasilitasi penyediaan infrastruktur perkebunan
		Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Menjamin ketersediaan kebutuhan sarana produksi pertanian tanaman pangan dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat dan mutu yang tepat	Penyediaan sarana produksi pertanian tanaman pangan
			Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan	Peningkatan pembinaan kelompok tani, teknis pertanian tanaman pangan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Menyediakan prasarana pertanian tanaman pangan yang memadai	Pelatihan/pembinaan peningkatan kemampuan petani dalam penerapan teknologi di pertanian tanaman pangan
			Menjamin ketersediaan kebutuhan sarana produksi pertanian hortikultura dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat dan mutu yang tepat	Fasilitasi penyediaan infrastruktur pertanian tanaman pangan
			Meningkatkan kemampuan SDM pertanian hortikultura	Penyediaan sarana produksi pertanian hortikultura
			Menyediakan prasarana pertanian hortikultura yang memadai	Peningkatan pembinaan kelompok tani, teknis pertanian hortikultura
				Pelatihan/pembinaan peningkatan kemampuan petani dalam penerapan teknologi di pertanian hortikultura
				Fasilitasi penyediaan infrastruktur pertanian hortikultura
	Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, Sumber Daya Manusia Pertanian, dan akses pasar	Meningkatkan penyediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan	Peningkatan ketersediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan	
Mengembangkan jaringan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan		Fasilitasi bisnis dan promosi hasil pertanian dan perkebunan		
Meningkatkan mutu produk hasil pertanian dan perkebunan		Penerapan sistem manajemen mutu dalam proses budidaya dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan		
Memberdayakan petani, kelembagaan petani dan penyuluh pertanian		Peningkatan pemberdayaan kelompok tani, kelembagaan tani dan penyuluh pertanian		

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATA SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun kedepan, upaya pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, program dimaksud adalah:

1. Urusan Pangan
 - a. Program Penguatan Cadangan Pangan.
 - b. Program Peningkatan Pola Pangan Harapan
2. Urusan Pertanian
 - a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
 - b. Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian
 - c. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian
 - d. Program Perlindungan Tanaman
 - e. Program Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan
 - f. Program Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - g. Program Penyediaan Benih Pertanian
 - h. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran
 - i. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

Program prioritas pembangunan pertanian perkebunan dan Ketahanan Pangan diurai menjadi kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi :

1. Urusan Pangan
 - a. Program Penguatan Cadangan Pangan.
 - 1) Penanganan daerah rawan pangan
 - 2) Pendukung kegiatan TNI (TMMD) untuk Pertanian
 - 3) Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan

- 4) Pengembangan cadangan pangan daerah
- b. Program Peningkatan Pola Pangan Harapan
 - 1) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan
 - 2) Penyusunan Pola Pangan Harapan
 - 3) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
2. Urusan Pertanian
 - a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
 - 1) Pengembangan Mekanisasi Pertanian
 - 2) Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian
 - 3) DAK Pertanian
 - b. Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian
 - 1) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian
 - 2) Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian dan Perikanan
 - 3) Pengembangan Balai Penyuluhan Kecamatan
 - 4) Pengembangan kemampuan Petani dan lembaga petani
 - 5) Pengembangan Kelembagaan Petani IPDMIP
 - c. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian
 - 1) Pengembangan pengolahan dan pemasaran Hasil Produksi Pertanian
 - d. Program Perlindungan Tanaman
 - 1) Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)
 - e. Program Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan
 - 1) Pengembangan perkebunan tanaman tahunan
 - 2) Pengembangan perkebunan tanaman semusim dan rempah
 - 3) Peningkatan Sarana Produksi Perkebunan
 - 4) Peningkatan Kualitas Bahan Baku Komoditas Tembakau
 - f. Program Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 1) Pengembangan Pertanian Hortikultura
 - 2) Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan
 - g. Program Penyediaan Benih Pertanian
 - 1) Operasional UPT Balai Benih Pertanian
 - h. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
- 2) Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah
- 4) Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
- 6) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah
- 9) Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah
- i. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Pemutakhiran data dan Pelayanan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Program Peningkatan Pola Pangan Harapan						500.000		550.000		605.000		665.500		732.000		3.052.500
	Konsumsi protein	gram/ka pita/hari	45,17	45,20	48,15		50,35		52,55		54,8		57		57,00	
	Konsumsi Energi	kkal/kapita/hari	2.391	2.396	2.401		2.406		2.411		2.416		2.421		2421	
	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	70,00	92,43	93,43		94,43		95,43		96,43		97,43		97,43	
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan						300.000		350.000		405.000		465.500		532.000		2.052.500
	luas pekarangan yang digunakan untuk pengembangan pangan dan diversifikasi pangan	m3			3.000		4.000		4.200		4.400		4.600		21.000	
Penyusunan Pola Pangan Harapan						100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		500.000
	Jumlah pelaksanaan hasil survey Pola Pangan Harapan	Kali			1		1		1		1		1		5	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan						100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		500.000
	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan survey pengamanan pangan	Kali			1		1		1		1		1		5	
Program Perlindungan Tanaman						350.000		385.000		423.500		465.850		512.435		2.136.785
	Persentase penurunan serangan OPT (%)	%	2,00	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		10,00	
Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)						350.000		385.000		423.500		465.850		512.435		2.136.785
	Jumlah jenis sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman	Jenis			4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian						10.078.374		12.078.374		12.678.374		13.278.374		13.878.374		61.991.870
	Persentase kelompok tani terlatih yang menerapkan teknologi (%)	%	20,00	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00	
Pengembangan Mekanisasi Pertanian						1.550.000		2.050.000		2.100.000		2.150.000		2.200.000		10.050.000
	Jumlah jenis alat mesin pertanian	Jenis			3		3		3		3		3		3	
Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian						3.900.000		4.900.000		4.950.000		5.000.000		5.050.000		23.800.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
	Jumlah Jenis Infrastruktur di Bidang Pertanian	Jenis			4		4		4		4		4		4	
DAK Pertanian						4.628.374		5.128.374		5.628.374		6.128.374		6.628.374		28.141.870
	Jumlah jenis Sarana Prasaranan Bidang Pertanian	Jenis			4		4		4		4		4		4	
Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan						1.200.000		2.120.000		2.252.000		2.397.200		2.556.920		10.526.120
	Produksi tanaman kelapa deres	Ton	54.731,00	53.408,86	54.830,58		55.388,89		55.952,78		56.522,31		57.097,53		279.792,09	
	Produksi tanaman kelapa dalam	Ton	13.284,00	13.905,12	14.039,02		14.174,53		14.311,39		14.449,63		14.589,24		71.563,81	
	Produksi tanaman kopi	Ton	142,00	143,00	144,9		146,34		147,81		149,29		150,78		739,11	
	Produksi tanaman pala	Ton	25,97	36,35	38,97		41,62		44,29		47,00		49,73		221,60	
	Produksi tanaman lada	Ton	58,77	59,36	59,95		60,55		61,16		61,77		62,39		305,81	
	Produksi tanaman cengkeh	Ton	310,00	484,16	486,81		489,97		493,17		496,4		499,66		2950,17	
	Produksi tanaman tembakau	Ton	14,00	14,00	14,41		14,56		14,7		14,85		15,00		73,53	
	Rasio jumlah petani pengguna safety belt	%	NA	NA	0		0,25		0,25		0,25		0,25		1,00	
Pengembangan perkebunan tanaman tahunan						500.000		1.350.000		1.397.000		1.467.200		1.551.920		6.266.120
	jumlah arit deres yang tersedia	Unit			150		150		150		150		150		750	
	jumlah pongkor nira yang tersedia	Unit			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		15.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan													
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra			
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
	jumlah safty belt yang tersedia	Unit			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		8.000	
	Jumlah peserta pelatihan	Orang			150		150		150		150		150		150		750	
	jumlah pupuk organik yang tersedia	Ton			22		22		22		22		22		22		110	
	Jumlah bibit kopi yang tersedia	Bibit			7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		35.000	
Pengembangan perkebunan tanaman semusim dan rempah						650.000		650.000		705.000		730.000		755.000			3.490.000	
	Jumlah petani yang dibina	Orang			150		150		150		150		150		150		750	
Peningkatan Sarana Produksi Perkebunan						300.000		310.000		325.000		350.000		375.000			1.660.000	
	Jumlah anggota kelompok yang dibina	Orang			150		150		150		150		150		150		750	
	Jumlah tanaman cengkeh yang diremajakan	Buah			6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		30.000	
Peningkatan Kualitas Bahan Baku Komoditas Tembakau						250.000		310.000		325.000		350.000		375.000			1.610.000	
	Jumlah anggota kelompok yang dibina	Orang			150		150		150		150		150		150		750	
	Luas lahan intensifikasi tembakau	Ha			25		25		25		25		25		25		125	
Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura						4.400.000		4.790.000		5.040.000		5.290.000		5.540.000			25.060.000	
	Produksi tanaman Durian	Ton	4.862,40	9.780,30	9.829,41		9.879,02		9.929,11		9.979,71		10.030,82		49.648,07			

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
	Produksi tanaman Pisang	Ton	20.510,80	27.183,40	27.390,56		27.599,79		27.811,11		28.024,55		28.240,12		139066.13	
	Produksi tanaman Cabai	Ton	1,570.00	1.800,10	1.816,45		1.832,50		1.848,60		1.865,00		1.881,50		9.244,05	
	Produksi tanaman Padi	Ton	375.000	390.000	400.000		425.000		450.000		475.000		500.000		22.500.000	
	Produksi tanaman Jagung	Ton	13.006	13.136	13.267		134		13.534		13.669		13.806		67.677	
	Produksi tanaman Kedelai	Ton	1,562.01	1,58	1.593,41		1.609,34		1.625,43		1.641,69		1.658,11		8.128,00	
	Produktivitas tanaman Padi	ton / ha	5,57	5,63	5,77		5,89		6,01		6,13		6,25		6,25	
	Produktivitas tanaman Jagung	ton / ha	5,92	6,30	6,36		6,46		6,48		6,54		6,60		6,60	
	Produktivitas tanaman Kedelai	ton / ha	1,53	1,34	1,36		1,38		1,39		1,41		1,43		1,43	
Pengembangan Pertanian Hortikultura						2.650.000		2.790.000		2.790.000		2.790.000		2.790.000		13.810.000
	Jumlah petani penerima Bimbingan Teknis Hortikultura	Orang			150		150		150		150		150		750	
	Jumlah petani peserta pembinaan petani hortikultura	Orang			150		150		150		150		150		800	
Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan						1.750.000		2.000.000		2.250.000		2.500.000		2.750.000		11.250.000
	jumlah komoditas tanaman pangan yang menerapkan teknologi pertanian	Jenis			3		3		3		3		3		3	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
	Jumlah komoditas yang dihasilkan setelah mengikuti Sekolah Lapang dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Tanaman Terpadu	Jenis			3		3		3		3		3		3	
	Jumlah komoditas yang memiliki sertifikat organik	Jenis			3		3		3		3		3		3	
Program Penyediaan Benih Pertanian						500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	2.500.000	
	Jumlah komoditas pertanian yang dibuat perbenihan	Jenis			3		3		3		3		3		15	
Operasional UPT Balai Benih Pertanian						500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	2.500.000	
	Jumlah bibit tanaman pangan	Ton			2		2		2		2		2		10	
	Jumlah bibit tanaman hortikultura	Bibit			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		5.000	
	Jumlah bibit tanaman perkebunan	Bibit			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		5.000	
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian						100.000		0		0		0		0	100.000	
	Persentase penyuluh pertanian terlatih	%	100,00	100,00	100,00		0		0		0		0		100	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian						100.000		0		0		0		0		100.000
	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti training	Orang			180		0		0		0		0		180	
Program Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kelembagaan Petani						2.543.326		0		0		0		0		2.543.326
	Cakupan bina kelompok petani	%	74,00	74,00	76,05		0		0		0		0		76,05	
Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian dan Perikanan						50.000		0		0		0		0		50.000
	jumlah kecamatan yang menyusun buku program penyuluhan tingkat BPP	Buah			27		0		0		0		0		27	
Pengembangan Balai Penyuluhan Kecamatan						75.000		0		0		0		0		75.000
	Jumlah BPP Model	Unit			3		0		0		0		0		3	
Pengembangan kemampuan Petani dan lembaga petani						550.000		0		0		0		0		550.000
	Jumlah pertemuan KTNA, P4S, KWT, Gapoktan	Kali			27		0		0		0		0		27	
Pengembangan Kelembagaan Petani IPDMIP						1.868.326		0		0		0		0		1.868.326
	Jumlah kelembagaan P3A dan GP3A yang terbina	Kelompok			11		0		0		0		0		11	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian						500.000		550.000		605.000		665.500		732.050		3.052.550
	Jumlah Produksi Hasil olahan produk pertanian	Ton	NA	NA	120		122		124		126		128		128.0	
Pengembangan pengolahan dan pemasaran Hasil Produksi Pertanian						500.000		550.000		605.000		665.500		732.050		3.052.550
	Jumlah KWT dan Pelaku Usaha Pertanian peserta pelatihan dan pembinaan	Kelompok			280		308		338		372		409		409	
	Jumlah kegiatan promosi dan pameran yang diikuti atau dilaksanakan	Kali			5		5		5		5		5		25	
Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian						0		2.648.194		2.597.947		3.189.307		4.479.794		12.915.242
	Persentase penyuluh pertanian terlatih	%	100,00	100,00	0		100		100		100		100		100	
	Cakupan bina petani	%	74.00	74.00	0.00		78.16		85.84		93.11		100		100.00	
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian						0		100.000		100.000		100.000		100.000		400.000
	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti training	Orang			0		160		150		150		150		610	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan						0		50.000		50.000		50.000		50.000		200.000
	Jumlah kecamatan yang menyusun buku program penyuluhan tingkat BPP	Buah			0			27		27		27		27		27
Pengembangan balai penyuluhan kecamatan						0		75.000		75.000		75.000		75.000		300.000
	Jumlah BPP Model	Kec			0			4		5		6		6		21
Pengembangan kemampuan petani dan lembaga petani						0		575.000		600.000		625.000		650.000		2.450.000
	jumlah kecamatan peserta pertemuan KTNA, P4S, KWT	Kali			0			27		27		27		27		27
	Jumlah demplot yang terbentuk	Unit			0			27		27		27		27		27
Pengembangan kelembagaan petani IPDMIP						0		1.848.194		1.772.947		2.339.307		3.604.794		9.565.242
	Jumlah kecamatan peserta pembinaan kelembagaan P3A dan GP3A	Kelompok			0			11		11		11		11		11
Program Penguatan Cadangan Pangan						900.000		990.000		1.089.000		1.197.900		1.317.690		5.494.590
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	95,00	95,00	96,00			97,00		98,00		99,00		100,00		100,00
	Tingkat ketersediaan energi	%	91,00	91,00	92,00			93,00		94,00		95,00		96,00		96,00
	Tingkat ketersediaan protein (%)	%	91,00	91,00	92,00			93,00		94,00		95,00		96,00		96,00

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	%	62,00	62,00	63,00		64,00		65,00		66,00		67,00		100,00	
Penanganan daerah rawan pangan						450.000		490.000		539.000		597.900		667.690		2.744.590
	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	Desa			52		60		68		74		84		84	
Pendukung kegiatan TNI (TMMD) untuk Pertanian						50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		250.000
	Jumlah pelaksanaan pasar murah	Kali			3		3		3		3		3		15	
Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan						150.000		175.000		200.000		225.000		250.000		1.000.000
	Jumlah pelaksanaan pembinaan masyarakat di desa mandiri pangan dan anggota lumbung pangan serta masyarakat rawan pangan lainnya	Kali			1		1		1		1		1		5	
Pengembangan cadangan pangan daerah						250.000		275.000		300.000		325.000		350.000		1.500.000
	Jumlah pelaksanaan pelaksanaan survey pengembangan cadangan pangan daerah	Kali			1		1		1		1		1		5	
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						3.125.000		3.358.000		3.548.475		3.746.251		3.951.917		17.729.643
	Persentase realisasi keuangan program	%	75,00	83,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
	Persentase realisasi fisik program	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						140.000		154.000		169.400		186.340		204.974	854.714	
	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan			12		12		12		12		12		12	
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah						150.000		165.000		181.500		199.650		219.615	915.765	
	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		12	
Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah						930.600		934.600		938.600		942.600		946.600	4.693.000	
	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorarnya	Orang			103		103		103		103		103		103	
Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah						1.035.000		1.138.500		1.195.425		1.255.196		1.317.956	5.942.077	
	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						115.000		126.500		139.150		153.065		168.372		702.087
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Jenis			13		13		13		13		13		13	
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						50.000		55.000		60.000		65.000		70.000		300.000
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis			5		5		5		5		5		25	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah						300.000		350.000		400.000		450.000		500.000		2.000.000
	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit			5		5		5		5		5		25	
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah						279.400		304.400		329.400		354.400		379.400		1.647.000
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Unit			41		41		41		41		41		41	
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit			7		7		7		7		7		7	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah						125.000		130.000		135.000		140.000		145.000		675.000
	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Orang			28		28		28		28		28		28	
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						250.000		275.032		302.504		332.718		366.020		1.526.274
	Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		750.000
	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan	Kali			4		4		4		4		4		4	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
Pemutakhiran data dan Pelayanan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah						100.000		125.032		152.504		182.718		216.020		776.274
	Tersusnya Data Dan Informasi Pertanian	Tahun			1		1		1		1		1		5	
Sub Total						24.946.700		28.744.600		30.141.800		32.228.600		35.067.200		151.128.900

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 7.1**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Produksi Tanaman Pertanian	%	NA	NA	1	1	1	1		5
2	Ketersediaan Pangan Utama	%	90	NA	90	95	96	96	97	97
3	Penguatan cadangan pangan	%	70	NA	75	80	82	84	86	86

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci per Urusan dan Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Target Akhir	Ket	Jenis
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN											
1	Persentase Penguatan cadangan pangan	%	70	75	75	80	82	84	86	86	sasaran	IKK
2	Skor Pola Pangan Harapan	%	90.01	90.20	90.80	91.00	91.20	91.40	91.60	91.60	sasaran	IKK
3	Produksi tanaman kopi	Ton	142.00	143.00	144.90	146.34	147.81	149.29	150.78	739.11	program	IKK
4	Produksi tanaman Kedelai	Ton	1,562.01	1,578	1,593.41	1,609.34	1,625.43	1,641.69	1,658.11	8,128.00	program	IKK
5	Produktivitas tanaman Jagung	ton/ha	5.92	6.30	6.36	6.46	6.48	6.54	6.60	6.60	program	IKK
6	Produksi tanaman pala	Ton	25.970	36.35	38.97	41.62	44.29	47.00	49.73	221.60	program	IKK
7	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	70.00	92.43	93.43	94.43	95.43	96.43	97.43	97.43	program	IKK
8	Produksi tanaman Durian	Ton	4,862.40	9,780.30	9,829.41	9,879.02	9,929.11	9,979.71	10,030.82	49,648.07	program	IKK
9	Produksi tanaman Jagung	Ton	13,006	13,136	13,267	13,4	13,534	13,669	13,806	67,677	program	IKK
10	Tingkat ketersediaan energi	%	91.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	96.00	program	IKK
11	Tingkat ketersediaan protein (%)	%	91.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	96.00	program	IKK
12	Produksi tanaman lada	Ton	58.77	59.36	59.95	60.55	61.16	61.77	62.39	305.81	program	IKK
13	Produksi tanaman cengkeh	Ton	310.00	484.16	486.81	489.97	493.17	496.40	499.66	2950.17	program	IKK
14	Produksi tanaman Pisang	Ton	20,510.80	27,183.40	27,390.56	27,599.79	27,811.11	28,024.55	28,240.12	13,9066.13	program	IKK

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Target Akhir	Ket	Jenis
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
15	Produksi tanaman kelapa deres	Ton	54,731	53,408.86	54,830.58	55,388.89	55,952.78	56,522.31	57,097.53	279,792.09	program	IKK
16	Produksi tanaman kelapa dalam	Ton	13,284	13,905.12	14,039.02	14,174.53	14,311.39	14,449.63	14,589.24	71,563.81	program	IKK
17	Produktivitas tanaman Kedelai	ton/ha	1.53	1.34	1.36	1.38	1.39	1.41	1.43	1.43	program	IKK
18	Produktivitas tanaman Padi	ton/ha	5.57	5.63	5.77	5.89	6.01	6.13	6.25	6.25	program	IKK
19	Produksi tanaman tembakau	Ton	14.00	14.00	14.41	14.56	14.70	14.85	15.00	73.53	program	IKK
20	Produksi tanaman Cabai	Ton	1,570.00	1,800.10	1,816.45	1,832.50	1,848.60	1,865.00	1,881.50	9,244.05	program	IKK
21	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	%	62.00	62.00	63.00	64.00	65.00	66.00	67.00	100.00	program	IKK
22	Rasio jumlah petani pengguna safety belt	%	NA	NA	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	program	IKK
23	Produksi tanaman Padi	Ton	375	390	400	425	450	475	500	22,500,000	program	IKK
24	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	95.00	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00	program	IKK

BAB. VIII

PENUTUP

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dirumuskan indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas untuk periode tahun 2018-2023, sebagai arah kebijakan dan pijakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018–2023 untuk kurun waktu selama lima tahun, guna menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2018–2023, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh komponen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijadikan pedoman didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sebagai dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023.

4. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala perlu dilaksanakan dalam rangka monitoring pencapaian target-target Renstra.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perencanaan strategik ini masih memerlukan pengembangan berdasarkan pengalaman dan aspirasi masyarakat ditingkat pelaksanaan di lapangan, sehingga arah pembangunan pertanian dan Ketahanan Pangan dapat terlaksana.

Purwokerto, April 2019
BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN